



RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BALONG TAHUN 2026



**KECAMATAN BALONG
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KECAMATAN BALONG

Jalan Pemuda Nomor 4F , Balong , Ponorogo, Jawa Timur 63461,
Telepon 0352-371302

Laman balong.ponorogo.go.id, Pos-el kecamatanbalong@ponorogo.go.id

KEPUTUSAN CAMAT BALONG
KABUPATEN PONOROGO
NOMOR : 100.3.3/ 5 /405.29.11/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN BALONG
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2026

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT BALONG
KABUPATEN PONOROGO

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Bupati Ponorogo tanggal 7 Pebruari 2025 Nomor 694 Tahun 2025, Tentang Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2026;
- b. Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Tahun 2026 perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, di atas maka guna tertib hukum dan administrasi dalam pelaksanaannya di pandang perlu diatur dan ditetapkan dengan menetapkan Keputusan Camat Balong tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021/No.1419);
 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomo 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2024 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024–2044 (Lembaran Daerah Kabupatemn Ponorogo 2024(1): 244 hlm TLD: 16
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 (8) TLD Nomor 21;
24. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 66 Tahun 2025, tanggal 10 Juli 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026,
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 - 2029;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN CAMAT BALONG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2026

- PERTAMA : Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Tahun 2026, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Penanggung jawab :
 - a. Mengkoordinasikan pekerjaan yang oleh Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Balong Tahun 2026;
 - b. Memberikan koreksi, arahan dan petunjuk kepada Tim dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Balong Tahun 2026
 2. Ketua :
 - a. Mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Balong Tahun 2026;
 - b. Membantu Penanggungjawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Balong Tahun 2026
 - c. Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan Tim Penyusun kepada Penanggungjawab penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Balong Tahun 2026.
 3. Sekretaris :
 - a. Membantu Ketua dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Balong Tahun 2026;
 - b. Membantu Anggota Tim dalam Penyusunan laporan kegiatan;
 - c. Menyiapkan segala sesuatu baik akomodasi, peralatan dan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Balong Tahun 2026.
 4. Anggota :
 - a. Mereviu hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu;
 - b. Melaksanakan analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Balong;

- c. Melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat daerah Kecamatan Balong
- d. Melakukan telaahan terhadap rancangan awal RKPD;
- e. Merumuskan, tujuan, sasaran dan program kegiatan;
- f. Merumuskan tujuan prioritas.

KETIGA : Keputusan Camat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan / penyempurnaan apabila diperlukan.



Ditetapkan di : Balong

Pada Tanggal : 10 Pebruari 2025

Camat Balong

Katmanto, SH., M.M.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19670204 198809 1 009

Tembusan keputusan ini disampaikan

Kepada Yth. :

1. Bupati Ponorogo;
2. Wakil Bupati Ponorogo;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo;
4. Inspektur Kabupaten Ponorogo;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Ponorogo.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BALONG KABUPATEN
PONOROGO
NOMOR : 100.3.3/ 5 /405.29.11/2025
TANGGAL : 10 Pebruari 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA
RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN BALONG
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN
BALONG KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2026

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM STRUKTURAL |
|----|------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Ketua | Camat |
| 2 | Sekretaris | Sekretaris Kecamatan |
| 3 | Kelompok Kerja (Pokja) | 1. Kasi Tata Pemerintahan 2. Kasi Pemberdayaan Masyarakat 3. Kasi Kesejahteraan Masyarakat 4. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 5. Kasi Pelayanan Umum 6. Kasubag Umum dan Kepegawaian 7. Kasubag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan 8. Bendahara |

Ditetapkan di : Balong
Pada Tanggal : 10 Pebruari 2025
Camat Balong



Katmanto
Katmanto, SH., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670204 198809 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KECAMATAN BALONG

Jl. Pemuda Nomor 4.F Telephone (0352) 371 266 Kode Pos 63461
Laman balong.ponorogo.go.id, Pos-el kecamatanbalong@ponorogo.go.id

KEPUTUSAN CAMAT BALONG KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : 100.3.3/ 8 /405.29.11/ 2026

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA)

PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO

TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT BALONG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kabupaten Ponorogo, maka perlu menyusun Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Tahun 2026 ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a maka perlu menetapkan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Tahun 2026 dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Camat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);-5-
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur)
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2005 -2026;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026;
20. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Camat Balong Kabupaten Ponorogo tentang Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kecamatan Balong Tahun 2026

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA Perangkat Daerah) Tahun 2026 adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Tahun 2026.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA) Tahun 2026 Merupakan Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

Pasal 3

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA Perangkat Daerah) Tahun 2026 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

(Berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan)

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

Pasal 4

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA Perangkat Daerah) Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 digunakan sebagai Pedoman Perangkat Daerah Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Tahun 2026.

Pasal 5


Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Ponorogo

Pada Tanggal : Agustus 2025

Plt. Camat Balong




Toni Khristiawan, S.STP, M.Si

Rembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19761213 199511 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat taufik serta hidayahNya sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja Kecamatan Balong Tahun 2026 Rencana Kerja ini merupakan suatu wujud dari model penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Balong Tahun 2026

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Balong ini adalah dalam rangka mewujudkan akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan yang baik oleh Kecamatan Balong. Apabila dalam penyusunan Rencana Kerja ini terdapat kekurangan, kami sangat terbuka untuk menerima saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan Rencana Kerja ini.

Demikian Rencana Kerja ini kami susun sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Kecamatan Balong Tahun 2026



Balong, Maret 2025

Pt. Camat Balong

Toni Khristiawan, S.STP, M.Si

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19761213 199511 1 001

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | ii |
| | |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 4 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 6 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 7 |
| | |
| BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU | |
| 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah | 11 |
| FORMAT A | 22 |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | 33 |
| FORMAT B | 32 |
| 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | 48 |
| 2.4 Terhadap Rancangan Awal RKPD | 52 |
| FORMAT C | 53 |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat | 57 |
| FORMAT D | 58 |
| | |
| BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN | |
| 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional | 85 |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah | 86 |
| 3.3 Program dan Kegiatan | 88 |
| FORMAT E | 93 |
| | |
| BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH | 97 |
| | |
| BAB IV : PENUTUP | 100 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Hal ini tertuang dalam Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Penyusunan Rencana Kerja, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah , serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026;

Mengacu dari Permendagri No.54 Tahun 2010, dimana setiap satuan perangkat Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam 5 tahun mendatang. Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra Perangkat Daerah untuk mewujudkan visi Kabupaten Ponorogo di Kecamatan Balong dalam rangka mencapai “**MEWUJUDKAN**

KABUPATEN PONOROGO HEBAT (Harmonis, Elok, Bergas, Amanah Dan Takwa)” yang menjadi landasan dalam penyusunan RPJM Daerah. Dari dokumen Renstra selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah per tahun. Penyusunan Renja Perangkat Daerah merujuk pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dan melakukan pengukuran dan evaluasi Renja tahun sebelumnya

Perangkat Daerah dan melakukan pengukuran dan evaluasi Renja tahun sebelumnya

Adapun Tema Pembangunan Kabupaten Ponorogo Tahun 2026 adalah **“Pemantapan Fungsi Pariwisata, Pembinaan Pemuda dan Olah Raga melalui Organisasi Pemuda dan Karangtaruna dan Pembangunan Infrastruktur Dasar, Penguatan dan Mitigasi Bencana serta Perencanaan Tata Ruang yang Berkualitas”**.

Sedangkan untuk Prioritas Pembangunan di Kecamatan mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah di Kabupaten Ponorogo sesuai (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) RKPD Tahun 2026 yaitu **“Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik serta Peningkatan Keamanan dan Ketertiban”**.

Kedudukan susunan organisasi dan tugas/fungsi Pemerintah kecamatan dengan berlakunya Otonomi Daerah berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam arti Kecamatan sebagai perangkat Pemerintah pusat berubah menjadi perangkat daerah. Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati atau Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

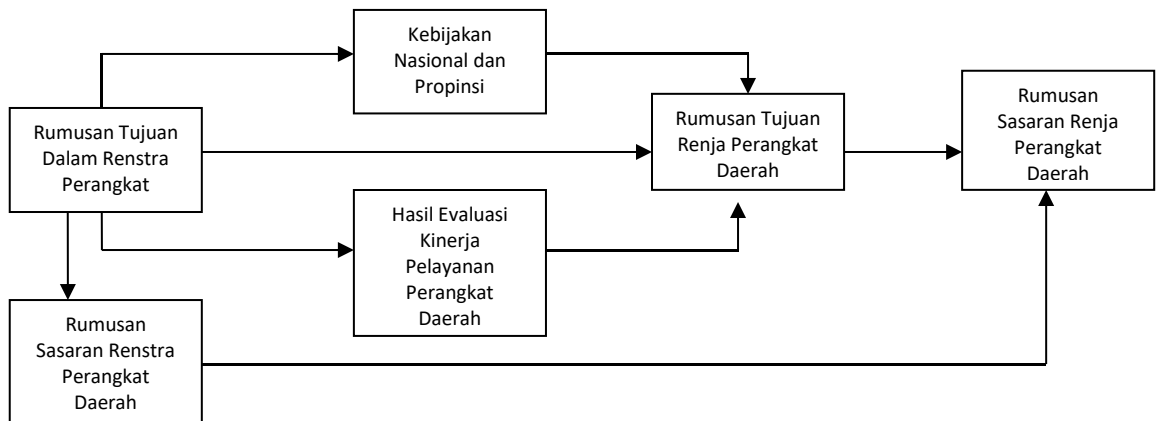
1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan.
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya

Mengingat semakin kompleks tugas Camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif. Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten. Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh dinas daerah yang dipadu dengan swadaya masyarakat. Sedangkan dalam perencanaan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan Camat berkewajiban membuat Renstra.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan;, Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah tertentu dan dipimpin oleh Camat. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Sehubungan dengan hal itu agar Camat dapat mendukung suksesnya pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Ponorogo maka dipandang perlu disusun Rencana Kerja yang sistematis di Kecamatan Balong

RUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA



1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2026 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangunan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);-5-

16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur)
19. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026;
21. Keputusan Camat Balong Nomor : 188/06/405.30.11/2021 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Balong Tahun 2021-2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Balong Tahun 2026 adalah
 - Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Balong Tahun 2026 ;
 - Sebagai Acuan dan Pedoman pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Balong pada Tahun 2026 .

b. Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Balong tahun 2026 adalah :

- Mensinkronisasi serta mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Balong Tahun 2026 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Ponorogo tahun 2026 .
- Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan;
- Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya
- Sebagai Dasar Penyusunan RKA-Perangkat Daerah
- Sebagai Alat Evaluasi dan Pengendalian dalam Pelaksanaan Program/Kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Balong

Penyusunan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Balong dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Kecamatan Balong tahun 2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah , proses penyusunan Renja Perangkat Daerah , keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah , dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja kecamatan Balong Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi

masing-masing Perangkat Daerah , serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo

Sub bab ini berisi uraian mengenai:

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah ;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah ;
- 3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/global, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah dan
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun rencana.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Daerah Kabupaten Ponorogo

Telaahan terhadap kebijakan daerah Kabupaten Ponorogo dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah, visi dan misi Kepala Daerah serta yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah .

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo

Subbab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah .

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- 1) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal: Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir, dsb.
- 2) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yang meliputi:
 - a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan Renja Kecamatan Balong tahun 2026 mengacu pada tugas dan fungsi kecamatan beserta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh Bupati kepada Kecamatan. Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Berdasarkan Perda tersebut dijelaskan bahwa Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Dalam Kabupaten Ponorogo. Camat adalah pemimpin dan coordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan dalam Kabupaten Ponorogo. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat Desa dan kelurahan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten :

1. Tugas :

Adapun Tugas Camat adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;

7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan;
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas tersebut Camat menyelenggarakan fungsi :

- (1) Pemberian supervisi dan pembinaan dalam penyusunan rencana strategis kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan.
- (2) Pelaksanaan tugas-tugas pembinaan wilayah.
- (3) Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertical di wilayah kerjanya.
- (4) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja dan instansi vertical di wilayah kerjanya.
- (5) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
- (6) Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kepada Bupati.
- (7) Melaksanakan pelayanan masyarakat sesuai tugas dan fungsinya
- (8) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Renja Kecamatan Balong tahun 2026 merupakan penjabaran Renstra Kecamatan Balong, dimana penyusunannya merujuk pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026. Adapun Pelaksanaan program dan kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Balong tahun 2022 antara lain :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.
 - 1.1. **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.**

Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu :

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Kegiatan ini berupa : Belanja Makanan dan Minuman Rapat koordinasi penyusunan Dokumen Perencanaan.

Indikator Sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun dengan rencana sebanyak 8 Dokumen dapat terealisasi sebanyak 8 Dokumen dengan capaian 100%

Dana yang dianggarkan untuk tahun 2024 sebesar Rp. 400.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 400.000,- sehingga capaiannya 100%

- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar SKPD

Kegiatan ini berupa : Belanja Makanan dan Minuman rapat koordinasi penyusunan Dokumen Laporan Capaian Kinerja.

Indikator Sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja yang disusun dengan rencana 17 Dokumen dapat terealisasi sebanyak 17 Dokumen dengan capaian 105,88%

Dana yang dianggarkan pada Tahun 2024 sebesar Rp. 400.000, dapat terealisasi sebesar Rp. 400.000,- sehingga capaiannya sebesar 100%

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub Kegiatan ini berupa : Belanja Gaji PNS dan Belanja Tunjangan PNS.

Indikator Kegiatan ini adalah Jumlah Penerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan rencana sejumlah 17 Orang

Penerima dapat terealisasi sebanyak 17 Orang penerima sehingga capaiannya 105,88%

Dana yang dianggarkan pada tahun 2024 sebesar Rp. 1.806.633.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 1.713.676.340,- sehingga capaiannya 94,85%

b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Sub Kegiatan ini berupa : Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan

Indikator Sub kegiatan ini adalah Jumlah Penerima Jasa Administrasi Keuangan dengan target 5 Orang Penerima dapat terealisasi sebanyak 5 Orang penerima dengan capaian 100%

Dana yang dianggarkan pada tahun 2024 sebesar Rp. 19.320.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 19.320.000,- sehingga capaiannya sebesar 100%

c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Sub Kegiatan ini berupa : Belanja Makanan dan Minuman Rapat penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun

Indikator Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD dengan rencana 5 Dokumen Laporan dapat terealisasi sebanyak 5 Dokumen Laporan dengan capaian sebanyak 100%

Dana yang dianggarkan pada Tahun 2024 sebesar Rp. 400.000,- dapat terealisasi sebesar 400.000,- sehingga capaiannya sebesar Rp. 100%

1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yaitu :

a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Sub Kegiatan ini berupa : Belanja Kain Dinas PDH

Indikator Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya dengan rencana 20 Paket dapat terealisasi sebanyak 20 Paket sehingga capaiannya sebesar 100%

Dana yang dianggarkan pada tahun 2024 sebesar Rp. 4.550.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 4.54.9550,- sehingga capaiannya sebesar Rp. 100%

1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yaitu :

a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sub Kegiatan ini berupa : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik

Indikator Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Paket komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia dengan rencana 1 Paket dapat terealisasi 1 Paket sehingga capaiannya sebesar 100%

Dana yang dianggarkan pada Tahun 2024 sebesar Rp. 2.070.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 2.070.000,- sehingga capaiannya sebesar 100%

b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan dengan rencana 3 Paket dapat terealisasi 3 Paket sehingga capaiannya sebesar 100%

Dana yang dianggarkan pada Tahun 2024 sebesar Rp. 32.899.500,- dapat terealisasi sebesar Rp. 32.799.500,- sehingga capaiannya sebesar 99,70%

c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub Kegiatan ini berupa : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor, Belanja Makanan dan Minuman Pegawai dan Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Indikator Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan dengan rencana 2 Paket dapat terealisasi sejumlah 2 Paket sehingga capaiannya 100%

Dana yang dianggarkan pada Tahun 2024 sebesar Rp. 42.318.615,- dapat terealisasi sebesar Rp. 42.318.100,- sehingga capaiannya sebesar 100%

- d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Sub Kegiatan ini berupa : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos

Indikator Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia dengan rencana 1 Paket dapat terealisasi 1 Paket sehingga capaiannya 100%

Dana yang dianggarkan pada tahun 2024 sebesar Rp. 1.012.500,- dapat terealisasi sebesar Rp. 1.012.500,- sehingga capaiannya 100%

- e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Sub Kegiatan ini berupa : Belanja Perjalanan Dinas Biasa

Indikator Sub Kegiatan ini adalah Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti dengan rencana Laporan dapat terealisasi sebanyak 2 Laporan sehingga capaiannya sebesar 100 %,

Dana yang dianggarkan pada Tahun 2024 terpaksa dirasionalisasi karena adanya anggaran yang harus dicukupi untuk kegiatan yang lain

1.5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan dalam merealisasikan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

Sub Kegiatan ini dialihkan untuk mencukupi kegiatan yang lain .

Indikator Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan target 12 Laporan dapat terealisasi sebanyak 12 Laporan sehingga capaiannya 100 %

Dana yang dianggarkan pada tahun 2024 sebesar Rp.970.300,- dapat terealisasi sebesar Rp 970.000,- sehingga capaiannya sebesar 99,97%

b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub Kegiatan ini berupa : Belanja Tagihan Telepon, Belanja Tagihan Air, Belanja Tagihan Listrik dan Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan

Indikator Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Pembayaran listrik, air , telepon dan Internet dengan rencana 12 Laporan dapat terealisasi sebanyak 12 Laporan sehingga capaiannya 100%

Dana yang dianggarkan pada tahun 2024 sebesar Rp. 10.429.120,- dapat terealisasi sebesar Rp. 9.778.123,- sehingga capaiannya sebesar 93,76%

1.6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan dalam merealisasikan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah :

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

Sub Kegiatan ini berupa : Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas, Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan, Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan, Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan

Indikator Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya dengan rencana 2 Unit kendaraan dapat terealisasi sebanyak 2 Unit Kendaraan sehingga capaiannya adalah 100%

Dana yang dianggarkan pada tahun 2024 sebesar Rp. 50.832.250,- dapat terealisasi sebesar Rp. 50.832.250,- sehingga capaiannya 100 %

b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Sub Kegiatan ini berupa : Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer

Indikator Sub Kegiatan ini adalah Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki dengan rencana 7 Unit dapat terealisasi sebanyak 7 Unit sehingga capaiannya sebesar 100%

Dana yang dianggarkan pada tahun 2024 sebesar Rp. 3.421.400,- dapat terealisasi 3.421.400,- sehingga capaiannya sebesar 100%

c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator Sub Kegiatan ini adalah Jumlah jumlah gedung kantor yang dipelihara/direhabilitasi dengan rencana 1 Unit dapat terealisasi sebanyak 1 Unit sehingga capaiannya sebesar 100%

Dana yang dianggarkan pada tahun 2024 sebesar Rp. 14.000.000,- dapat terealisasi 14.000.000,- sehingga capaiannya sebesar 100%

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

2.1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan adalah :

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan ini berupa : Belanja Makanan dan Minuman Tamu HUT RI dan Kota Sehat

Indikator Sub Kegiatan ini adalah Jumlah event yang diadakan dalam rangka peringatan HUT RI dengan rencana 3 Event dapat dilaksanakan sebanyak 3 Event sehingga capaiannya sebesar 100%, Jumlah Kelompok Seni Budaya Aktif dengan rencana 20 Kelompok Seni Budaya aktif bisa terlaksana sebanyak 20 Kelompok Sehingga capaiannya sebanyak 100%, Jumlah Pokja Sehat yang difasilitasi dengan rencana sebanyak 20 Pokja Sehat dapat terealisasi sebanyak 20 Pokja sehat sehingga capaiannya sebesar 100%, Jumlah Desa yang dimonitoring Penyaluran bantuan sosial dan bencana alam dengan rencana sebanyak 20 Desa dapat terealisasi sebanyak 20 sehingga capaiannya 100% .

Dana yang dianggarkan pada Tahun 2024 sebesar Rp. 17.225.000,- dapat terealisasi sebesar 17.025.000,- sehingga capaiannya sebesar 98,84%,

2.2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan adalah :

- a. Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

Sub Kegiatan ini berupa : Belanja Makanan dan Minuman Rapat koodinasi Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Indikator Sub Kegiatan ini adalah : Jumlah Standar Pelayanan Publik yang diterbitkan dengan rencana 1 SPP dapat terealisasi 1 SPP sehingga capaiannya sebesar 100%, Jumlah SOP yang diterbitkan dengan rencana 41 SOP dapat terealisasi sebanyak 41 SOP sehingga capaiannya sebanyak 100%, Jumlah Surat Rekomendasi Pindah/ Datang yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP dengan rencana 165 Surat dapat terealisasi sebanyak 163 Surat sehingga capaiannya sebesar 98,79 %

Dana yang dianggarkan pada tahun 2024 sebesar Rp. 400.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 400.000,- sehingga capaiannya sebesar 100%

2.3. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum adalah :

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta.

Sub Kegiatan ini berupa : Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga -Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih

Indikator kegiatan ini adalah Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta dengan rencana 2 Unit dapat terealisasi sebanyak 2 Unit sehingga capaiannya 100%

Dana yang dianggarkan tahun 2024 sebesar Rp. 29.948.500,- dapat terealisasi sebesar Rp. 29.948.500,- sehingga capaiannya 100%

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

3.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa adalah :

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Anggaran Sub Kegiatan ini dialihkan untuk kegiatan yang lain karena adanya rasionalisasi dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo

Indikator Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Desa yang mengikuti Lomba Desa di Tingkat Kecamatan dengan rencana 20 Desa, dapat terealisasi sebanyak 20 Desa, sehingga capaiannya adalah 100% dan Jumlah Desa yang melaksanakan kegiatan gotong royong dengan rencana 20 Desa dapat dilaksanakan 20 Desa sehingga capaiannya 100%

Dana yang dianggarkan tahun 2024 sebesar Rp. 21.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 21.000.000,- sehingga capaiannya 100%

4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

4.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan

Kepala Daerah

- a. Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional.

Indikator Sub kegiatan ini adalah Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi walaupun anggaran sudah tidak ada namun masih tetap bisa terlaksana sesuai dengan rencana berkat bantuan dari warga masyarakat dan Pemerintah Desa se Kecamatan Balong 1 Kegiatan dapat dilaksanakan sebanyak 1` Kegiatan berupa simaan Alquran di Musholla

Kecamatan Balong sehingga capaiannya sebesar 100% dan kegiatan MUI

Dana yang dianggarkan Tahun 2024 sebesar 10.200.000 dapat terealisasi sebesar Rp. 10.197.500,- sehingga capaiannya 99,98%

- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi, Pimpinan di Kecamatan

Sub Kegiatan ini berupa : Honorarium Tim Kegiatan(Hr Kapolsek dan Dan Ramil) dan Kegiatan Rakor Penyampaian Program Pemerintah pada Pengurus RT se Kecamatan Balong

Indikator Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Dengan Target 4 Dokumen dapat terealisasi sebanyak 4 Dokumen sehingga capaiannya sebesar 100%

Dana yang dianggarkan pada Tahun 2024 Rp. 33.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 33.000.000,- sehingga capaiannya 100%

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

5.1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat yaitu :

- a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

Kegiatan ini berupa : Belanja Makanan dan minuman rapat

Indikator kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Produk Hukum Desa yang tersusun dengan rencana 100 Dokumen Produk

hukum Desa dapat terealisasi 100 Produk Hukum Desa sehingga capaiannya 100%

Dana yang dianggarkan pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 400.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 400.000,- atau 100%

b. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Kegiatan ini berupa : Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Indikator kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa dengan target 20 Dokumen dapat terealisasi sebanyak 20 Dokumen sehingga capaiannya 100%

Dana yang dianggarkan pada tahun 2024 sebesar Rp. 400.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 400.000,- atau 100%

c. Sub Kegiatan Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan

Indikator Kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan dengan target 12 Laporan dapat teralisasi sebanyak 12 Laporan sehingga capaiannya sebesar 100%

Pada Tahun 2024 tidak dianggarkan karena petugasnya (non ASN) sudah tidak ada, namun target bisa terelaisasi sesuai yang telah ditetapkan.

d. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Sub Kegiatan ini berupa : Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Indikator Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dengan target 20 Dokumen dapat terealisasi 20 Dokumen sehingga dengan demikian hasilnya capaiannya sebesar 100%

Jumlah Koordinasi dengan SKPD dan Instansi lainnya (TNI dan POLRI), pemuka agama mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan target 4 Kegiatan dapat terealisasi sebesar 4 Kegiatan sehingga capaiannya 100%;

Jumlah Koordinasi pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja dengan target 4 Kegiatan dapat terealisasi sebesar 4 Kegiatan sehingga capaiannya 100%;

Jumlah Koordinasi dan pembinaan, pengendalian dalam rangka tertib perijinan dengan target 20 Kegiatan dapat terealisasi sejumlah 20 Kegiatan sehingga capaiannya sebesar 100%;

Jumlah Koordinasi dalam rangka pemantauan, deteksi dini serta kesiapsiagaan dan pengerahan satlinmas dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dari target sebesar 4 Kegiatan dapat terealisasi sebanyak 4 Kegiatan sehingga capaiannya sebesar 100%;

Jumlah Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum dari Target 1 Kegiatan, dapat terealisasi sejumlah 1 Kegiatan sehingga capaiannya sebesar 100,00%.

Jumlah pelaksanaan patroli wilayah dalam rangka mencegah timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat dari target 20 Kegiatan dapat terealisasi sebanyak 20 Kegiatan sehingga capaiannya sebesar 100%.

Dana yang dianggarkan pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp 4.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp 4.000.000,- sehingga capaiannya sebesar 100%

e. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif.

Sub Kegiatan ini berupa : Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota- bantuan transport

Indikator Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Desa yang melaksanakan Musrenbang dengan rencana sebanyak 20 Desa dan realisasi sebanyak 20 Desa sehingga capaiannya sebesar 100%

Dana yang dianggarkan pada tahun 2024 sebesar Rp. 4.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 4.000.000,- atau 100%

f. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kegiatan ini berupa : Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Indikator Kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desadengan target 20 Dokumen terealisasi sebanyak 20 Dokumen sehingga capaiannya sebesar 100%

Dana yang dianggarkan dalam Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 11.000.000,- Terealisasi sebesar Rp 11.000.000,- atau 100 %

Adapun lebih jelasnya sebagaimana pada Format A berikut ini :

FORMAT A

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Ponorogo**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Balong

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2025 | Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan | |
|-------------------|--|---|--|---|--|---|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun(n-2) 2024 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 1. Prosentase Administrasi Perkantoran dan kepegawaian untuk mendukung kelancaran tugas pokok & fungsi 2. Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu 3. Prosentase Sarana dan Prasarana aparatur yang layak fungsi | 100% 100% 100% | 100% 100% 100% | 100% 100% 100% | 100% 100% 100% | 100% 100% 100% | 100% 100% 100% | 100% 100% 100% | 100% 100% 100% |
| 7.01.01.2.0 1. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Prosentase dokumen Perencanaan dan Evakuasi capaian kinerja yang disusun | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------|------------------------|------------------------|------|
| 7.01.01.2.0 1.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 100% | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 50% |
| 7.01.01.2.0 1.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar SKPD | Jumlah Dokumen Laporam Capaian Kinerja yang disusun | 17 Dokumen | 17 Dokumen | 17 Dokumen | 18 Dokumen | 106% | 17 Dokumen | 17 Dokumen | 100% |
| 7.01.01.2.0 2. | Administrasi Keuangan | Prosentase (%) Dokumen Administrasi Keuangan yang disusun | 100% | 100% | 100% | 100% | | 100% | 100% | 100% |
| 7.01.01.2.0 2.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Penerima Gaji dan Tunjangan ASN | 17 Orang Penerima | 17 Orang Penerima | 17 Orang Penerima | 17 Orang Penerima | 105,88 % | 17 Orang Penerima | 17 Orang Penerima | 100% |
| 7.01.01.2.0 2.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Penerima Jas administrasi Keuangan | 4 Orang Penerima | 4 Orang Penerima | 4 Orang Penerima | 4 Orang Penerima | 100% | 5 Orang Penerima | 5 Orang Penerima | 0% |
| 7.01.01.2.0 2.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang dsusun tepat waktu | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 100% | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 100% |
| 7.01.01.2.0 5 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase (%) Keakuratan Data Kepegawaian | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% |
| 7.01.01.2.0 5.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Penerimaa pakaian Dinas | 20 Orang Penerima | 21 Orang Penerima | 21 Orang Penerima | 21 Orang Penerima | 100% | 20 Orang Penerima | 20 Orang Penerima | 100% |
| 7.01.01.2.0 3 | Administrasi Umum | Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 83% | 100% |
| 7.01.01.2.0 6.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 100% | 1 Paket | 1 Paket | 0% |
| 7.01.01.2.0 6.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 0 Unit | 3 Unit | 5 Unit | 5 Unit | 100% | 1 Unit | 0 Unit | 0% |
| 7.01.01.2.0 6.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 1. Jumlah Penerima Belanja Makanan 2. Minuman Harian dan Jumlah | 20 Penerima 1 Paket | 20 Penerima 1 Paket | 20 Penerima 1 Paket | 20 Penerima 1 Paket | 100% | 20 Penerima 1 Paket | 20 Penerima 1 Paket | 100% |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--|
| | | ATK yang tersedia | | | | | | | | | |
| 7.01.01.2.0 6.05 | Penyediaan Barang dan Penggandaan Cetakan | Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 100% | 1 Paket | 1 Paket | 0% | |
| 7.01.01.2.0 6.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti | 3 Rakpr | 5 Rakor | 5 Rakor | 5 Rakor | 100% | 3 Rakor | 0 Rakor | 100% | |
| 7.01.01.2.0 8 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase (%) Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 19,83% | 100% | |
| 7.01.01.2.0 8.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Surat Keluar Masuk yang dikelola | 1500 surat | 1455 Surat | 1565 Surat | 1565 Surat | 10,46% | 1500 Surat | 220 Surat | 14,67% | |
| 7.01.01.2.0 8.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Pembayaran listrik, air & telepon | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% | 12 Laporan | 3 Laporan | 25,00% | |
| 7.01.01.2.0 9 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase (%) sarana prasarana penunjang Pemerintah Daerah yang terpelihara | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 20% | 40% | |
| 7.01.01.2.0 9.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara | 6 Unit | 5 Unit | 5 Unit | 6 Unit | 100% | 6 Unit | 0 Unit | 40% | |
| 7.01.01.2.0 9.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki | 5 Unit | 5 Unit | 5 Unit | 5 Unit | 100% | 7 Unit | 0 Unit | 0% | |
| 7.01.01.2.0 9.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara | 2 Unit | 2 Unit | 2 Unit | 2 Unit | 100% | 2 Unit | 2 Unit | 0% | |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Jumlah responden yang disurvei Pelayanan Publik | 150 Responden | 150 Responden | 150 Responden | 150 Responden | 150 Responden | 150 Responden | 50 Responden | 150 Responden | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|---|--|--------|
| 7.01.02.2.0 1 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Prosentase hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang di tindak lanjuti | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95,24% | 95,24% |
| 7.01.02.2.0 1.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1. Jumlah event yang diadakan dalam rangka peringatan HUT RI 2. Jumlah Kelompok Seni Budaya Aktif 3. Jumlah Pokja Sehat yang difasilitasi 4. Jumlah Desa yang difasilitasi dan dimonitoring Penyaluran bantuan sosial dan bencana alam | 3 Event 20 Kelompok | 3 Event 20 Kelompok | 3 Event 20 Kelompok | 3 Event 20 Kelompok | 100% 100% 100% | 0 Event 20 Kelompok 20 Pokja 20 Desa | 0 Event 20 Kelompok 20 Pokja Sehat 20 Desa | 95,24% |
| 7.01.02.2.0 2 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | Prosentase Dokumen Perencanaan Pelayanan yang disusun | 100% | 100% | 100% | 100% | | 100% | 30,43% | 30,43% |
| 7.01.02.2.0 2.01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | 1. Jumlah Penerima Belanja Makanan 2. Jumlah Standar Pelayanan Publik (SPP) yang diterbitkan 3. Jumlah Surat Rekomendasi Pindah/ Datang yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP | 1 SPP 41 SOP 165 surat | 1 SPP 41 SOP 210 surat | 1 SPP 41 SOP 170 surat | 1 SPP 41 SOP 163 surat | 100% 100% 112,94 % | 1 SPP 41 SOP 150 surat | 1 SPP 41 SOP 35 surat | 30,43% |
| 7.01.02.2.0 3 | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Prosentase (%) Koordinasi Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 7.01.02.2.0 3.02 | Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta | Jumlah prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang terpelihara | 2 Unit | 2 Unit | 2 Unit | 2 Unit | 100% | 2 Unit | 2 Unit | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Prosentase Desa yang meningkat Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) nya | 80% | 80% | 80% | 80% | | 80% | 85% | |
| 7.01.03.2.0 1 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 1. Jumlah Desa Yang mengikuti Lomba Desa di Tingkat Kabupaten 2. Jumlah Desa yang mengikuti Lomba BBGRM Tingkat Kabupaten | 1 Desa 1 Desa | 1 Desa 1 Desa | 1 Desa 1 Desa | 1 Desa 1 Desa | 100% 100% | 1 Desa 1 Desa | 1 Desa 1 Desa | 100% 100% |
| 7.01.03.2.0 1.03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1. Jumlah Desa yang mengikuti Lomba Desa di Tingkat Kecamatan 2. Jumlah Desa yang melaksanakan kegiatan gotong royong | 20 Desa 20 Desa | 20 Desa 20 Desa | 20 Desa 20 Desa | 20 Desa 20 Desa | 100% 100% | 20 Desa 20 Desa | 20 Desa 20 Desa | 100% 100% |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Prosentase Desa yang meningkat Indeks Ketahanan Sosial (IKS) nya | 80% | 80% | 80% | 80% | | 80% | 80% | 80% |
| 7.01.05.2.0 1 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Prosentase dokumen perencanaan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 64,52% | 64,52% |
| 7.01.05.2.0 1.04 | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi | 1 Fasilitasi | 3 Kegiatan Fasilitasi | 3 Kejiata Fasilitasi | 1 Kegiatan Fasilitasi | 100% | 2 Fasilitasi | 0 Fasilitasi | 0% |
| 7.01.05.2.0 1.08 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi, Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Desa yang menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa secara tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan | 20 Desa | 20 Desa | 20 Desa | 20 Desa | 100% | 20 Desa | 20 Desa | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---|--|--|--|--|------------------------------|---|---|------------------------------|
| 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Prosentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7.01.06.2.0 1 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Prosentase hasil Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 53,80% | 100% |
| 7.01.06.2.0 1.01 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Produk Hukum Desa yang tersusun | 100 Dokumen | 60 Dokumen | 60 Dokumen | 100 Dokumen | 100% | 100 Dokumen | 40 Dokumen | 66,67% |
| 7.01.06.2.0 1.03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 1. Jumlah Desa yang difasilitasi, dibina dan dimonitoring pelaksanaan ADD 2. Jumlah Desa yang melaksanakan tertib administrasi pelaporan (SPJ) / ADD 3. Jumlah Desa yang melaksanakan tertib administrasi pelaporan (SPJ) DD 4. Jumlah Desa yang melaksanakan tertib administrasi pelaporan (SPJ) DD | 20 Desa 20 Desa 20 Desa 20 Desa | 20 Desa 20 Desa 20 Desa 20 Desa | 20 Desa 20 Desa 20 Desa 20 Desa | 20 Desa 20 Desa 20 Desa 20 Desa | 100% 100% 100% 100% | 20 Desa 20 Desa 20 Desa 20 Desa | 20 Desa 20 Desa 20 Desa 20 Desa | 100% 100% 100% 100% |
| 7.01.06.2.0 1.04 | Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Penerima Jasa klinik hukum | 1 Orang Penerima | 1 Orang Penerima | 1 Orang Penerima | 1 Orang Penerima | 100% | 1 Orang Penerima | 1 Penerima | 100% |
| 7.01.06.2.0 1.11 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 1. Jumlah Penanganan Kasus Gangguan Trantibum 2. Jumlah Desa yang dimonitoring Pembinaan Kewilayahan 3. Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum 4. Jumlah Desa yang dilaksanakan koordinasi dan | 1 Kasus 20 Desa 20 Dokumen 20 Desa | 1 Kasus 20 Desa 20 Dokumen 20 Desa | 1 Kasus 20 Desa 20 Dokumen 20 Desa | 1 Kasus 20 Desa 20 Dokumen 20 Desa | 100% 100% 100% 100% | 1 Kasus 20 Desa 20 Dokumen 20 Desa | 0 Kasus 20 Desa 20 Dokumen 20 Desa | 100% 100% 100% 100% |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|------|
| | | pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa | | | | | | | | |
| 7.01.06.2.0 1.13 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan Musrenbang | 20 Desa | 20 Desa | 20 Desa | 20 Desa | 100% | 20 Desa | 20 Desa | 100% |
| 7.01.06.2.0 1.16 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah kelompok PKK aktif | 20 Kelompok | 20 Kelompok | 20 Kelompok | 20 Kelompok | 100% | 20 Kelompok | 20 Kelompok | 100% |

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Balong berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Balong dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- Persentase jumlah surat /Rekomendasi yang diterbitkan terhadap yang diajukan;
- Prosentase Jumlah usulan hasil Musrenbang Desa yang menjadi bahan Musrenbang Tingkat Kecamatan
- Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa dan Administrasi Pelaporan (SPJ) ADD yang disusun secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perundangan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Balong memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan :

1. Pembinaan terhadap anggota satgas Linmas yang berada di desa dan kelurahan agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya ;
2. Peningkatan dan perwujudan siskamling di tingkat desa, dusun atau lingkungan sampai pada tingkat RT dan RW;
3. Mengadakan patroli rutin gabungan Muspika dan Dinas terkait serta Desa dan Kelurahan untuk melihat langsung aktivitas masyarakat dalam bersiskamling
4. Mengadakan sosialisasi peraturan perundang – undangan di seluruh desa dan kelurahan bersama dengan jajaran Muspika dan Dinas atau Instansi terkait ;

5. Mengadakan pembinaan dan penekanan kepada pemerintah desa untuk membuat peraturan desa sebagai dasar atau payung hukum di tingkat desa;
6. Dan melaksanakan kegiatan lainnya seperti Perayaan HUT Kemerdekaan RI, Grebeg Suro; dan hari jadi
7. Mengadakan pembinaan PBB terhadap petugas pemungut di desa;
8. Penataan ruang pelayanan publik di kecamatan
9. Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan baik di kecamatan dan desa se Kecamatan Balong
10. Pembinaan aparat kecamatan dan perangkat desa secara rutin;
11. Pelaksanaan apel pagi setiap hari dan khusus hari Senin apel pagi diadakan evaluasi kegiatan satu minggu melibatkan personil kecamatan,
12. Mengadakan Rapat koordinasi Kepala Desa dan Sekretaris Desa se Kecamatan Balong seminggu sekali atau setiap kali sesuai kebutuhan
13. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan dan desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya;
14. Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan Dinas dan Instansi di tingkat kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di dinas dan instansi di tingkat kecamatan;
15. Mengadakan pengawasan melekat terhadap aparat yang berada di Kecamatan Balong;
16. Peningkatan kedisiplinan perangkat desa;
17. Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDes, dan Susunan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Desa;
18. Mengikutsertakan pada setiap kesempatan guna mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan perangkat desa;
19. Memberikan sosialisasi bagi perangkat desa dan kelurahan terkait dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang terus mengalami penyempurnaan dan perubahan;

20. Pembinaan, monitoring dan evaluasi secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa

Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan

1. Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, PPKM, dan sumber dana lainnya);
2. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian, perikanan dan peternakan;
3. Penertiban organisasi HIPPA di masing-masing desa;
4. Pemantauan kegiatan perluasan, rehabilitasi dan normalisasi jaringan irigasi;
5. Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan;
6. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana strategis kecamatan dengan seluruh elemen di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di desa dengan melibatkan para tokoh masyarakat;
8. Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Balong;
9. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan;
10. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Posyandu;
11. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera

Kinerja Pelayanan di Bidang Kemasyarakatan

1. Monitoring penyaluran bantuan kepada rumah tangga miskin ;
2. Monitoring penyaluran KIS;
3. Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi lembaga – lembaga keagamaan;
4. Memfasilitasi pembangunan tempat – tempat ibadah;
5. Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan;

6. Pembinaan di bidang kepemudaaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
7. Pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
8. Pembinaan dan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari;
9. Membantu penanganan masalah masalah social dan Bencana Alam

Adapun analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo sebagaimana format B berikut ini :

| FORMAT B | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------|-----|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
| Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Balong | | | | | | | | | | | | |
| Kabupaten Ponorogo | | | | | | | | | | | | |
| No | Indikator | SPM / Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisa |
| | | | | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 1. Prosentase Administrasi Perkantoran dan kepegawaian untuk mendukung kelancaran tugas pokok & fungsi 2. Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu 3. Prosentase Sarana dan Prasarana aparatur yang layak fungsi | | | | | | | | | 100% | 100% | |
| 1 | Prosentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Prosentase dokumen Perencanaan dan Evakuasi capaian kinerja yang disusun | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun | | | 8 Dokumen | | | | 8 Dokumen | | | | |
| 1.1.2 | Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja yang disusun | | | 18 Laporan | | | | 18 Laporan | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|
| 1.2. | Prosentase (%) Dokumen Administrasi Keuangan yang disusun | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Jumlah Penerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | 18 Orang / bulan | | | | 18 Orang / bulan | | | |
| 1.2.2 | Jumlah Penerima Jas administrasi Keuangan | | | 12 Dokumen | | | | 12 Dokumen | | | |
| 1.2.3 | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang dsusun tepat waktu | | | 5 laporan | | | | 5 laporan | | | |
| 1.3 | Persentase (%) Keakuratan Data Kepegawaian | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Jumlah Penerimaa pakaian Dinas | | | 20 Paket | | | | 20 Paket | | | |
| 1.4 | Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | 1 Paket | | | | 1 Paket | | | |
| 1.4.2 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | 3 Paket | | | | 3 Paket | | | |
| 1.4.3 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | 3 Paket | | | | 3 Paket | | | |
| 1.4.4 | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | 1 Paket | | | | 1 Paket | | | |
| 1.4.5 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 25 Laporan | | | | 25 Laporan | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|--|
| 1.5 | Prosentase (%) Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 12 Laporan | | | | 12 Laporan | | | | |
| 1.5.2 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | 12 Laporan | | | | 12 Laporan | | | | |
| 1.6 | Prosentase (%) sarana prasarana penunjang Pemerintah Daerah yang terpelihara | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1 | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | 7 Unit | | | | 7 Unit | | | | |
| 1.6.2 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | 7 Unit | | | | 7 Unit | | | | |
| 1.6.3 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | 1 Unit | | | | 1 Unit | | | | |
| 2 | Jumlah responden yang disurvei Pelayanan Publik | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Prosentase hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang di tindak lanjuti | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 6 Dokumen | | | | 6 Dokumen | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|--|
| 2.2 | Prosentase Dokumen Perencanaan Pelayanan yang disusun | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | | | 42 Dokumen | | | | 42 Dokumen | | | | |
| 2.3 | Prosentase (%) Koordinasi Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta | | | 3 Unit | | | | 3 Unit | | | | |
| 3 | Prosentase Desa yang meningkat Indeks Ketahanan Ekonominya | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | 1. Jumlah Desa Yang mengikuti Lomba Desa di Tingkat Kabupaten 2. Jumlah Desa yang mengikuti Lomba BBGRM Tingkat Kabupaten | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | 12 Laporan | | | | 12 Laporan | | | | |
| 4 | Prosentase Desa yang meningkat Indeks Ketahanan Sosial (IKS) nya | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Prosentase dokumen perencanaan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|--|-------------|--|--|--|-------------|--|--|--|--|
| 4.1.1 | Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi | | | 3 kegiatan | | | | 3 kegiatan | | | | |
| 4.1.2 | Jumlah Desa yang menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa secara tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan | | | 4 Dokumen | | | | 4 Dokumen | | | | |
| 5 | Prosentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Prosentase hasil Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | | | 100 Dokumen | | | | 100 Dokumen | | | | |
| 5.1.2 | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | 20 Dokumen | | | | 20 Dokumen | | | | |
| 5.1.3 | Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan | | | 20 Laporan | | | | 20 Laporan | | | | |
| 5.1.4 | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 20 Dokumen | | | | 20 Dokumen | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 5.1.5 | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | | | 20 Dokumen | | | | 20 Dokumen | | | | |
| 5.1.6 | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | 20 Dokumen | | | | 20 Dokumen | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1. Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran perangkat daerah secara partisipatif dan tepat waktu 2. Persentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan sarana prasarana perangkat daerah yang memadai 3. Persentase pelaksanaan administrasi realisasi anggaran serta pengelolaan pencatatan aset yang akuntabel | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 1.1 | Prosentase dokumen Perencanaan dan Evakuasi capaian kinerja yang disusun | | | | 100% | 100% | 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 1.1.1 | Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun | | | | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 8 Dokumen | | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 8 Dokumen | |
| 1.1.2 | Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja yang disusun | | | | 18 Laporan | 18 Laporan | 18 Laporan | | 18 Laporan | 18 Laporan | 18 Laporan | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|--|
| 1.2. | Prosentase (%) Dokumen Administrasi Keuangan yang disusun | | | | 100% | 100% | 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 1.2.1 | Jumlah Penerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 17 Orang / bulan | 17 Orang / bulan | 17 Orang / bulan | | 18 Orang / bulan | 18 Orang / bulan | 18 Orang / bulan | |
| 1.2.2 | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | | 12 Laporan | 12 Dokumen | 12 Dokumen | |
| 1.2.3 | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 5 laporan | 5 laporan | 5 laporan | | 5 laporan | 5 laporan | 5 laporan | |
| 1.3 | Persentase (%) Keakuratan Data Kepegawaian | | | | 100% | 100% | 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 1.3.1 | Jumlah Penerimaa pakaian Dinas | | | | 19 Paket | 19 Paket | 19 Paket | | 20 Paket | 20 Paket | 20 Paket | |
| 1.4 | Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi | | | | 100% | 100% | 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 1.4.1 | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | |
| 1.4.2 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | |
| 1.4.3 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 3 Paket | 3 Paket | 3 Paket | | 3 Paket | 3 Paket | 3 Paket | |
| 1.4.4 | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|------------|------------|------------|--|------------|------------|------------|--|
| 1.4, 5 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 3 Laporan | | 2 Laporan | 0 Laporan | 3 Laporan | |
| 1.5 | Prosentase (%) Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 100% | 100% | 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 1.5. 1 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | |
| 1.5. 2 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | |
| 1.6 | Persentase sarana dan prasarana barang milik daerah yang terpelihara | | | | 100% | 100% | 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 1.6. 1 | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 6 Unit | 6 Unit | 6 Unit | | 2 Unit | 6 Unit | 6 Unit | |
| 1.6. 2 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 6 Unit | 6 Unit | 6 Unit | | 7 Unit | 7 Unit | 7 Unit | |
| 1.6. 3 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | |
| 2 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | | | | 83% | 83% | 83% | | 83% | 83% | 83% | |
| 2.1 | Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | | | | 100% | 100% | 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 2.1. 1 | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 6 Dokumen | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 6 Dokumen | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|------------|------------|------------|--|------------|------------|------------|--|
| 2.2 | Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | | | | 100% | 100% | 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 2.2.1 | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | | | | 42 Dokumen | 42 Dokumen | 42 Dokumen | | 42 Dokumen | 42 Dokumen | 42 Dokumen | |
| 2.3 | Persentase koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang terpelihara | | | | 100% | 100% | 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 2.3.1 | Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta | | | | 2 Unit | 2 Unit | 2 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 2 Unit | |
| 3 | Indeks Desa Membangun (IDM) | | | | 85% | 90% | 90% | | 85% | 90% | 90% | |
| 3.1 | Prosentase koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat | | | | 100% | 100% | 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 3.1.1 | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 2 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 2 Laporan | |
| 3.2 | Prosentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan | | | | 100% | 100% | 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 3.2.1 | Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | |
| 4 | Persentase administrasi yang memenuhi standar tata kelola pemerintah | | | | 100% | 100% | 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 4.1 | Prosentase koordinasi urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan | | | | 100% | 100% | 100% | | 100% | 100% | 100% | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|-------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|--|
| 4.1.1 | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | 50 Orang | 50 Orang | 50 Orang | | 159 Orang | 150 Orang | 150 Orang | |
| 4.1.2 | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | |
| 5 | Persentase desa yang memenuhi standar tata kelola pemerintah desa di wilayah kecamatan | | | | 100% | 100% | 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 5.1 | Persentase fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | | | | 100% | 100% | 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 5.1.1 | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | | | | 100 Dokumen | 100 Dokumen | 100 Dokumen | | 100 Dokumen | 100 Dokumen | 100 Dokumen | |
| 5.1.2 | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | 20 Dokumen | 20 Dokumen | 20 Dokumen | | 20 Dokumen | 20 Dokumen | 20 Dokumen | |
| 5.1.3 | Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|--|--|------------|------------|------------|--|------------|------------|------------|--|
| 5.1.4 | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | 20 Dokumen | 20 Dokumen | 20 Dokumen | | 20 Dokumen | 20 Dokumen | 20 Dokumen | |
| 5.1.5 | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | 20 Dokumen | 20 Dokumen | 20 Dokumen | | 20 Dokumen | 20 Dokumen | 20 Dokumen | |
| 5.1.6 | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | | 20 Dokumen | 20 Dokumen | 20 Dokumen | | 20 Dokumen | 20 Dokumen | 20 Dokumen | |

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Bagian ini akan membahas tentang hal-hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

Kecamatan Balong sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berdasar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Lembaga) lain di lingkup Kabupaten Ponorogo. Kecamatan Balong masih memerlukan peningkatan pelayanan terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain:

- a) sarana dan prasarana yang tersedia kurang lengkap dan memadai;
- b) Sistem kerja yang belum optimal;
- c) keterbatasan SDM yang berkualitas;
- d) Belum maksimalnya anggaran untuk kegiatan setiap kepala seksi pelaksana teknis tugas camat.

Visi-Misi Kepala Daerah Kabupaten Ponorogo terpilih periode 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

Visi :

“MEWUJUDKAN PONOROGO HEBAT (Harmonis, Elok, Bergas, Amanah Dan Ber-taqwa)”

Visi pembangunan Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 ini menjadi arah pembangunan yang sistematis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan segenap pemangku kepentingan pembangunan Kabupaten Ponorogo. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh

seluruh elemen masyarakat Kabupaten Ponorogo baik aparaturn pemerintahan, masyarakat, maupun swasta.

1. Harmonis

Menunjukkan harapan untuk terciptanya kehidupan yang penuh kedamaian dan keseimbangan antara masyarakat, budaya, dan alam di Kabupaten Ponorogo. Hubungan yang harmonis antara warga masyarakat diharapkan dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Pembangunan Ponorogo yang harmonis tercermin dalam fokus RPJMD yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat, keseimbangan sosial, serta integrasi budaya dan ekonomi. RPJMD Ponorogo menekankan pentingnya penguatan ketahanan sosial dan budaya, serta menjaga keberagaman yang ada di masyarakat Ponorogo.

2. Elok :

Makna "elok" dalam visi ini tercermin dalam perhatian terhadap kualitas lingkungan dan keindahan alam Ponorogo. RPJMD memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang mendukung kawasan wisata dan menjaga kelestarian lingkungan. Pengelolaan lingkungan yang baik dan pembangunan yang ramah lingkungan, seperti dalam aspek ekologi dan pengelolaan sumber daya alam, menjadi bagian penting dalam perencanaan jangka menengah Ponorogo diharapkan menjadi daerah yang menawan dan menarik bagi wisatawan maupun warganya.

3. Bergas:

Merujuk pada semangat pantang menyerah, kerja keras, dan daya juang masyarakat Ponorogo untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan. Ini menggambarkan tekad dan semangat yang tinggi untuk membangun daerah secara berkelanjutan berbasiskan daya saing daerah. RPJMD Ponorogo berfokus pada peningkatan kapasitas UMKM, koperasi, serta produktivitas tenaga kerja yang menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing daerah. Ini termasuk dalam penguatan transformasi ekonomi, infrastruktur, serta peningkatan kualitas pendidikan untuk menciptakan generasi yang siap menghadapi tantangan ekonomi global.

4. Amanah :

Pembangunan yang amanah berarti transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pemerintahan dan pengelolaan sumber daya daerah. RPJMD Ponorogo menekankan pentingnya birokrasi yang transparan dan akuntabel serta meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang efisien. Ini juga terkait dengan kebijakan yang memprioritaskan kepentingan rakyat, serta pengelolaan pemerintahan yang inklusif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

5. Ber-Taqwa

Aspek spiritual dalam visi ini mencerminkan pentingnya pembangunan yang berlandaskan pada nilai-nilai agama dan moral. RPJMD Ponorogo memandang pembangunan sebagai usaha untuk mewujudkan kesejahteraan yang tidak hanya material tetapi juga spiritual, melalui penguatan ketahanan sosial dan budaya, serta pengembangan karakter bangsa yang berlandaskan pada nilai-nilai spiritual dan moral, dengan masyarakat yang berakhlak baik dan menjalankan ajaran agama dengan penuh kesadaran

Misi :

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 maka dirumuskan dengan beberapa misi.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Balong merujuk pada **misi 4 yaitu ‘Transformasi Tata Kelola Untuk Mewujudkan Birokrasi yang Transparan, Akuntabel, Inklusif, Bermanfaat, serta Berdampak Secara Sosial dan Ekonomi Berbasis Revolusi Teknologi Informasi’** sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah Kabupaten Ponorogo memiliki peran lintas sektoral dalam pewujudan visi – misi Kepala Daerah terpilih.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dengan dokumen RPJMD Kabupaten Ponorogo tahun 2025-2029, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD.

Dalam mendukung Visi Misi Kabupaten Ponorogo utamanya misi (4) maka Kecamatan Balong memantapkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Balong, perlu ditentukannya isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Kurangnya sumber daya aparatur kecamatan sehingga pelayanan publik belum bisa maksimal.
2. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa membuka kesempatan bagi pemerintah desa untuk merealisasikan kebutuhan masyarakatnya. Kecamatan sebagai bagian dari pemerintah kabupaten yang selama ini menjalankan mandat otonomi daerah, tentunya tidak bisa lepas dari mekanisme pelaksanaan UU Desa ini. Sayangnya, pelibatan kecamatan belum diatur secara memadai. Peran kecamatan masih perlu diperkuat mengingat kapasitas pemerintah desa yang beragam.
3. Telah terdapat beberapa regulasi yang mengatur peran kecamatan dalam tata kelola pemerintahan desa. Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2008 bahkan secara khusus menjabarkan fungsi dan wewenang pemerintahan kecamatan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sayangnya, ketika undang-undang tersebut diganti dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belum dilengkapi dengan regulasi terkait peran kecamatan secara terperinci. UU Desa juga hanya menyebutkan peran camat secara eksplisit dalam pengangkatan pejabat desa, sementara peran dalam pembinaan dan pengawasan hanya ketika dimandatkan. Pada PP 43 Tahun 2014 ada penjelasan tentang tugas pembinaan dan pengawasan desa. Namun, penjelasan itu masih kurang spesifik karena hanya disebutkan memfasilitasi dan mengoordinasikan berbagai tugas

dan tanggung jawab desa. Tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang apa maksud “fasilitasi” dan “koordinasi” karena dianggap sudah jelas

4. Beberapa usulan yang diajukan dalam upaya penguatan peran pemerintah kecamatan dalam menjembatani peran pemerintah kabupaten/kota dan provinsi serta mendukung pemerintah desa dalam pelaksanaan UU Desa adalah:
 - a. Memperjelas fungsi dan kewenangan pemerintah kecamatan dalam pendampingan pemerintah desa melalui regulasi yang lebih terperinci;
 - b. Meningkatkan alokasi anggaran bagi pemerintah kecamatan dalam melaksanakan pendampingan pemerintah desa;
 - c. Memberikan pelatihan teknis mekanisme pelaksanaan UU Desa kepada aparat kecamatan secara memadai, misalnya, bagaimana cara memverifikasi kelengkapan dokumen prasyarat pencairan dana desa atau bagaimana melakukan pengawasan pelaksanaan

2.4. Terhadap Rancangan Awal RKPD

terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Ponorogo tahun 2026 dilakukan melalui proses membandingkan antara usulan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2026 dengan kebutuhan riil Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo pada tahun tersebut.

Hal ini dilakukan dalam rangka mengakomodir usulan-usulan perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah yang dikompilasikan dengan kebutuhan riil dengan tujuan menetapkan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2026 yang merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan Tupoksi Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo . tersebut digambarkan pada tabel Format C . berikut :

Format C
Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Ponorogo

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan
Balong

Lembar..... dari

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisa Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-------|---|-------------|--|----------------|---------------------|---|-------------|--|----------------|---------------------|-----------------|
| | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kec. Balong | Persentase cakupan pelayanan administrasi Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian yang sesuai SOP | 100% | 2.192.870.200,00 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kec. Balong | Prosentase capaian penunjang urusan pemerintahan Daerah | 100% | 2.192.870.200,00 | |
| 1.1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kec. Balong | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu. | 100% | 2.000.000,00 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kec. Balong | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu. | 100% | 2.000.000,00 | |
| 1.1.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kec. Balong | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 8 Dokumen | 1.000.000,00 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kec. Balong | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 8 Dokumen | 1.000.000,00 | |
| 1.1.2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kec. Balong | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 22 Laporan | 1.000.000,00 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kec. Balong | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 22 Laporan | 1.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------------|---|-----------------|-------------------------|---|--------------------|---|-----------------|-------------------------|--|
| 1.2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kec. Balong | Persentase pelaksanaan administrasi realisasi anggaran serta pengelolaan pencatatan aset yang akuntabel | 100% | 1.857.851.000,00 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kec. Balong | Persentase pelaksanaan administrasi realisasi anggaran serta pengelolaan pencatatan aset yang akuntabel | 100% | 1.857.851.000,00 | |
| 1.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kec. Balong | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 18 Orang /Bulan | 1.837.531.000,00 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kec. Balong | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 18 Orang /Bulan | 1.837.531.000,00 | |
| 1.2.2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kec. Balong | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 19.320.000,00 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kec. Balong | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 19.320.000,00 | |
| 1.2.3 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kec. Balong | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5 Laporan | 1.000.000,00 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kec. Balong | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5 Laporan | 1.000.000,00 | |
| 1.3 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kec. Balong | Persentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan sarana prasarana perangkat daerah yang memadai | 100% | 99.478.200,00 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kec. Balong | Persentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan sarana prasarana perangkat daerah yang memadai | 100% | 99.478.200,00 | |
| 1.3.1 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kec. Balong | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 29.000.000,00 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kec. Balong | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 29.000.000,00 | |
| 1.3.2 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kec. Balong | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 57.588.200,00 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kec. Balong | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 57.588.200,00 | |
| 1.3.3 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kec. Balong | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 2.970.000,00 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kec. Balong | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 2.970.000,00 | |
| 1.3.4 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kec. Balong | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 9.920.000,00 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kec. Balong | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 9.920.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------------|--|------------|----------------|---|-------------|--|------------|----------------|--|
| 1.4 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kec. Balong | Persentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan sarana prasarana perangkat daerah yang memadai | 100% | 10.591.150,00 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kec. Balong | Persentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan sarana prasarana perangkat daerah yang memadai | 100% | 10.591.150,00 | |
| 1.4.1 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kec. Balong | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 10.591.150,00 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kec. Balong | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 10.591.150,00 | |
| 1.5. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kec. Balong | Persentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan sarana prasarana perangkat daerah yang memadai | 100% | 222.949.850,00 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kec. Balong | Persentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan sarana prasarana perangkat daerah yang memadai | 100% | 222.949.850,00 | |
| 1.5.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kec. Balong | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 6 Unit | 50.832.250,00 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kec. Balong | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 6 Unit | 50.832.250,00 | |
| 1.5.2 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kec. Balong | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 6 Unit | 2.117.600,00 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kec. Balong | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 6 Unit | 2.117.600,00 | |
| 1.5.3 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kec. Balong | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | 170.000.000,00 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kec. Balong | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | 170.000.000,00 | |
| 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Kec. Balong | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 94% | 29.948.500,00 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Kec. Balong | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 94% | 29.948.500,00 | |
| 2.1 | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Kec. Balong | Persentase koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang terpelihara | 100% | 29.948.500,00 | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Kec. Balong | Persentase koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang terpelihara | 100% | 29.948.500,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|--------------------|---|-------------|-------------------------|--|--------------------|---|-------------|-------------------------|
| 2.1.1 | Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta | Kec. Balong | Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta | 3 Unit | 29.948.500,00 | Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta | Kec. Balong | Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta | 3 Unit | 29.948.500,00 |
| 3 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Kec. Balong | Indeks Desa Membangun (IDM) | 100% | 217.378.000,00 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Kec. Balong | Indeks Desa Membangun (IDM) | 100% | 217.378.000,00 |
| 3.1 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kec. Balong | Persentase desa yang memenuhi standar tata kelola pemerintah desa di wilayah kecamatan | 100% | 217.378.000,00 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kec. Balong | Persentase desa yang memenuhi standar tata kelola pemerintah desa di wilayah kecamatan | 100% | 217.378.000,00 |
| 3.1.1 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Kec. Balong | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 20 Dokumen | 92.603.000,00 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Kec. Balong | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 20 Dokumen | 92.603.000,00 |
| 3.1.2 | Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan | Kec. Balong | Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan | 12 Laporan | 8.200.000,00 | Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan | Kec. Balong | Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan | 12 Laporan | 8.200.000,00 |
| 3.1.3 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Kec. Balong | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 20 Dokumen | 24.000.000,00 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Kec. Balong | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 20 Dokumen | 24.000.000,00 |
| 3.1.4 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Kec. Balong | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 20 Dokumen | 92.575.000,00 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Kec. Balong | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 20 Dokumen | 92.575.000,00 |
| | JUMLAH | | | | 2.440.196.700,00 | | | | | 2.440.196.700,00 |

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi maupun lintas sektor. Berdasarkan hasil telaahan data dan informasi informasi dari penelitian lapangan serta pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten Ponorogo.

Usulan Program dan Kegiatan yang dibahas didalam Musrenbang Mekanisme diawali dari penggalian gagasan dari tingkat dukuh dengan melibatkan unsur tokoh masyarakat, tokoh pemuda unsur perempuan dan organisasi kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program/kegiatan yang akan dibawa ke forum Musrenbangdes, dari Forum Musrenbangdes menghasilkan sekala prioritas usulan yang akan di sampaikan ke Forum Musrenbang di Tingkat Kecamatan. Hasil dari Musrenbang Kecamatan merupakan sekala prioritas Program/kegiatan yang telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta isu-isu penting dari masing-masing Perangkat daerah yang ada di Kecamatan Balong

Uraian dari kajian tersebut adalah sebagaimana Format D sebagai berikut :

FORMAT D

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

Kabupaten Ponorogo

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Balong

| No | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran / Volume | Catatan |
|----|--|--|--------------------------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | PANDAK | | | | |
| 1 | hotmix jalan poros desa depan balai desa | jalan poros desa, RT 1 RW 1 Krajan | Panjang jalan yang dibangun | 300.000.000 | jalan sudah rusak dan jalan penghubung antar desa perlu perbaikan secara merata |
| 2 | hotmix jalan poros dukuh kresek | jalan poros kabupaten , RT 1 RW 2 Kresek | Panjang jalan yang dibangun | 200.000.000 | jalan sudah rusak dan jalan penghubung antar desa perlu perbaikan secara merata |
| 3 | pelebaran jembatan gundi | jalan poros desa, RT 1 RW 1 Gundi | Panjang/luas jembatan yang dibangun | 200.000.000 | ukuran jembatan terlalu kecil untuk tempat penghubung antar desa |
| 4 | pembangunan dan pelebaran jembatan kresek dan ciwung | jalan poros kabupaten, RT 3 RW 2 Kresek | Panjang/luas jembatan yang dibangun | 200.000.000 | ukuran jembatan terlalu kecil untuk tempat penghubung antar desa |
| 5 | talud jalan poros dukuh kresek | jalan poros kabupaten , RT 1 RW 2 Kresek | Panjang talud jalan yang dibangun | 300.000.000 | belum memiliki saluran irigasi air yang memadai |
| 6 | tanggul sungai aliran sungai ciwung kresek | jalan poros desa, RT 3 RW 1 Kresek | Panjang tanggul sungai yang dibangun | 350.000.000 | |

| | | | | | |
|----------|--------------------------------------|--|--|-------------------------|---|
| 7 | hotmix jalan poros desa dukuh krajan | jalan poros desa, RT 3 RW 2 Krajan | Panjang jalan yang dibangun | 300.000.000 | jalan sudah rusak dan jalan penghubung antar desa perlu perbaikan secara merata |
| 8 | taman desa | jalan poros desa, RT 1 RW 2 Kresek | Jumlah Paket Taman yang dibangun | 150.000.000 | belum memiliki taman desa untuk memajukan ekonomi desa |
| 9 | taman desa | jalan poros desa, RT 1 RW 2 Gundi | Jumlah Paket Taman yang dibangun | 150.000.000 | belum memiliki taman desa untuk memajukan ekonomi desa |
| 10 | hotmix jalan kates | jalan poros desa, RT 1 RW 2 Kates | Panjang jalan yang dibangun | 150.000.000 | jalan sudah rusak dan jalan penghubung antar desa perlu perbaikan secara merata |
| | JUMLAH | | | 2.300.000.000,00 | |
| 2 | BULUKIDUL | | | | |
| 1 | balai desa | jl. pabrik no. 9, RT2 RW 1 Pabrik | Jumlah Gedung kantor yang dibangun | 800.000.000 | kurang memadai |
| 2 | kantor desa | jl. pabrik no. 9, RT2 RW 1 Pabrik | Jumlah Gedung kantor yang dibangun | 500.000.000 | penambahan ruang pelayanan |
| 3 | hotmik | jl. bulukidul-pandak, RT1 RW 3 Pabrik | Panjang jalan yang dibangun | 90.000.000 | kurang memadai |
| 4 | gapura masuk desa | jl. pabrik no. 9, RT1 RW 1 Pabrik | Jumlah Gapuro jalan masuk Desa yang dibangun | 300.000.000 | belum ada |
| 5 | gapura batas desa | jl. pabrik no. 9, RT2 RW 1 Pabrik | Paket Gapuro Batas Desa yang dibangun | 300.000.000 | belum ada |
| 6 | gapura masjid | jl. bulukidul-pandak, RT1 RW 4 Ngecrak | Paket Gapuro masjid yang dibangun | 300.000.000 | belum ada |
| 7 | paving halaman kantor desa | jl. pabrik no. 9, RT2 RW 1 Pabrik | Luas halaman yang dibangun | 100.000.000 | belum ada |

| | | | | | |
|----------|--------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 8 | pavingisasi taman bermain anak | jl. bulukidul-pandak, RT2 RW 3 Ngecrak | Luas Taman Bermain anak yang dibangun | 250.000.000 | lapangan becek |
| 9 | gedung kesenian | jl. bulukidul-pandak, RT2 RW 3 Ngecrak | Paket Gedung Kesenian yang dibangun | 250.000.000 | belum ada |
| 10 | talud | jl. bulukidul-pandak, RT2 RW 3 Ngecrak | Panjang talud Jalan yang dibangun | 150.000.000 | ambrol dampak bencana |
| 11 | plengsengan | jl. bengkok, RT1 RW 3 Ngecrak | Panjang plengsengan yang dinagun | 125.000.000 | pengaman bahu jalan |
| 12 | kios pasar desa | jl. pabrik no. 9, RT2 RW 1 Pabrik | Paket Kios pasar desa yang dibangun | 250.000.000 | bangunan kurang |
| 13 | gedung madin | jl. ngecrak, RT2 RW 4 Ngecrak | Jumlah Gedung yang dibangun | 250.000.000 | penunjang pendidikan |
| 14 | gedung paud | jl. bulukidul-pandak, RT2 RW 4 Ngecrak | Jumlah Gedung yang dibangun | 250.000.000 | penunjang pendidikan |
| 15 | irigasi | jl. bengkok, RT1 RW 3 Pabrik | Panjang Irigasi yang dibangun | 200.000.000 | saluran irigasi belum lancar |
| 16 | sumur dalam | jl. bengkok, RT2 RW 4 Pabrik | Paket Sumur dalam yang dibangun | 100.000.000 | memperlancar irigasi |
| 17 | irigasi pertanian | dukuh pabrik, RT1 RW 1 Pabrik | Panjang saluran Irigasi yang dibangun | 200.000.000 | saluran irigasi belum lancar |
| | JUMLAH | | | 4.415.000.000,00 | |
| 3 | BULAK | | | | |
| 1 | talud penahan tanah (tpt) | RT1 RW 2, Asem Depok | Panjang talud Jalan yang dibangun | 200.000.000 | badan jalan tergerus air/erosi |
| 2 | jembatan jalan desa | RT 2 RW 1 Krajan | Panjang jembatan yang dibangun | 500.000.000 | jembatan sudah ada tetapi sudah rusak |
| 3 | pembangunan saluran irigasi | RT 2 RW 2 Krajan | Panjang saluran Irigasi yang dibangun | 100.000.000 | lanjutan irigasi |
| 4 | talud jalan desa | RT 2 RW 1 Krajan | Panjang talud Jalan yang dibangun | 100.000.000 | badan jalan tergerus air/erosi |
| 5 | pembangunan gapura | RT 2 RW 1 Asem Depok | Paket Gapuro yang dibangun | 200.000.000 | belum ada gapura |

| | | | | | |
|----|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------------------|
| 6 | pembangunan gapura | RT1 RW 2, Asem Depok | Paket Gapuro yang dibangun | 200.000.000 | belum ada gapura |
| 7 | pagar makam desa | RT 2 RW 2 Krajan | Panjang pagar makam yang dibangun | 200.000.000 | penegasan batas tanah makam desa |
| 8 | talud jalan pu | RT 1 RW 1 Krajan | Panjang talud Jalan yang dibangun | 200.000.000 | badan jalan tergerus air/erosi |
| 9 | paving block | RT 2 RW 2 Krajan | Panjang jalan yang dibangun | 200.000.000 | jalan makadam |
| 10 | tangkis sungai kali mayong | RT 2 RW 1 Krajan | Panjang tangkis yang dibangun | 200.000.000 | tangkis rusak |
| 11 | cek dam sungai kali mayong | RT 1 RW 1 Krajan | Paket cekdam yang dibangun | 500.000.000 | cek dam rusak |
| 12 | cek dam sungai kali mayong | RT 2 RW 2 Krajan | Paket cekdam yang dibangun | 500.000.000 | cek dam rusak |
| 13 | cek dam sungai kali mayong | RT 1 RW 2 Krajan | Paket cekdam yang dibangun | 500.000.000 | cek dam rusak |
| 14 | paving block | RT 1 RW 2 Krajan | Panjang jalan yang dibangun | 200.000.000 | jalan tanah |
| 15 | sumur dalam | RT 2 RW 1 Asem Depok | Paket Sumur dalam yang dibangun | 200.000.000 | belum ada sumur dalam |
| 16 | pembangunan rumah keranda | RT1 RW 2, Asem Depok | Paket rumah keranda yang dibangun | 10.000.000 | belum ada rumah keranda |
| 17 | pembangunan rumah keranda | RT 1 RW 1 Asem Depok | Paket rumah keranda yang dibangun | 10.000.000 | belum ada rumah keranda |
| 18 | talud jalan | RT 1 RW 2, Asem Depok | Panjang talud Jalan yang dibangun | 200.000.000 | badan jalan tergerus air/erosi |
| 19 | cekdam sungai asem depok | RT 2 RW 2, Asem Depok | Paket cekdam yang dibangun | 200.000.000 | cek dam rusak |
| 20 | cekdam sungai asem depok | RT 2 RW 2, Asem Depok | Paket cekdam yang dibangun | 200.000.000 | cek dam rusak |
| 21 | cekdam sungai asem depok | RT 1 RW 2, Asem Depok | Paket cekdam yang dibangun | 200.000.000 | cek dam rusak |

| | | | | | |
|----|---------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 22 | talud jalan | RT 1 RW 2, Asem Depok | Panjang talud Jalan yang dibangun | 200.000.000 | badan jalan tergerus air/erosi |
| 23 | paving block | RT 1 RW 2, Asem Depok | Panjang jalan yang dibangun | 200.000.000 | jalan tanah |
| 24 | kantor sekretariat pemuda | - | Paket gedung yang dibangun | 100.000.000 | belum ada kantor sekretariat |
| | JUMLAH | | | 5.320.000.000,00 | |
| 4 | NGENDUT | | | | |
| 1 | rabat jalan | jalan jend sudirman, RT 1 Rw 2 Puh Gading | Panjang jalan yang dibangun | 234.000.000 | jalan rusak |
| 2 | rabat bahu jalan | jalan jend sudirman, RT 1 Rw 2 Krawe | Panjang jalan yang dibangun | 234.000.000 | jalan sempit |
| 3 | aspal hotmix | jalan budjono, RT 2 Rw 1 Krawe | Panjang jalan yang dibangun | 300.000.000 | jalan berlobang |
| 4 | rabat jalan | jalan gajah mada, RT 3 Rw 2 Krajan | Panjang jalan yang dibangun | 234.000.000 | jalan rusak |
| 5 | rabat jalan | jalan jend sudirman, RT 1 Rw 2 Puh Gading | Panjang jalan yang dibangun | 400.000.000 | jalan rusak |
| 6 | jembatan | jalan jend sudirman, RT 1 Rw 1 Puh Gading | paket jembatan yang dibangun | 300.000.000 | jembatan sempit |
| 7 | aspal hotmix | jalan gajah mada, RT 1 Rw 1 Krawe | Panjang jalan yang dibangun | 300.000.000 | jalan berlobang |
| 8 | peningkatan jalan | jalan jend sudirman, RT 2 Rw 2 Krawe | Panjang jalan yang dibangun | 300.000.000 | jalan berlobang |
| 9 | peningkatan jalan | jalan jend sudirman, RT 3 Rw 1 Puh Gading | Panjang jalan yang dibangun | 254.000.000 | jalan berlobang |
| 10 | peningkatan jalan | jalan jend sudirman, RT 1 Rw 1 Puh Gading | Panjang jalan yang dibangun | 254.000.000 | jalan berlobang |
| 11 | rehap kantor desa | jalan budjaono, RT 1 Rw 2 Krawe | Paket gedung yang dibangun/dipelihara | 600.000.000 | perbaikan tata ruang |
| 12 | pagar taman belik sentul | jalan raden fatah, RT 2 Rw 2 Krawe | Panjang pagar yang dibangun | 250.000.000 | belum ada pagar |

| | JUMLAH | | | 3.660.000.000,00 | |
|----------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|
| 5 | KARANGPATIHAN | | | | |
| 1 | aspal rt 4/1 dusun tanggungrejo | arjuno, RT 4 RW 1 Tanggungrejo | Panjang jalan yang dibangun | 500.000.000 | jalan rusak |
| 2 | aspal rt 5/1 dusun tanggungrejo | arjuno, RT 5 RW 1 Tanggungrejo | Panjang jalan yang dibangun | 500.000.000 | jalan rusak |
| 3 | aspal rt 2/2 dusun tanggungrejo | arjuno, RT 2 RW 2 Tanggungrejo | Panjang jalan yang dibangun | 800.000.000 | jalan rusak |
| 4 | aspal rt 5/2 dusun tanggungrejo | arjuno, RT 1 RW 1 Tanggungrejo | Panjang jalan yang dibangun | 800.000.000 | jalan rusak |
| 5 | aspal rt 6/2 dusun tanggungrejo | arjuno, RT 6 RW 2 Tanggungrejo | Panjang jalan yang dibangun | 700.000.000 | jalan rusak |
| 6 | aspal rt2/1 dusun bendo | ontorejo, RT 2 RW 1 Bendo | Panjang jalan yang dibangun | 900.000.000 | jalan rusak |
| 7 | aspal rt 3/2 dusun bendo | ontorejo, RT 3 RW 2 Bendo | Panjang jalan yang dibangun | 900.000.000 | jalan rusak |
| 8 | aspal rt 4/2 dusun bendo | ontorejo, RT 4 RW 2 Bendo | Panjang jalan yang dibangun | 500.000.000 | jalan rusak |
| 9 | aspal rt 3/1 dusun krajan | arjuno, RT 3 RW 1 Krajan | Panjang jalan yang dibangun | 500.000.000 | jalan rusak |
| 10 | aspal rt 3/2 dusun krajan | arjuno, RT 3 RW 2 Krajan | Panjang jalan yang dibangun | 900.000.000 | jalan rusak |
| 11 | aspal rt 4/2 dusun krajan | Arjuno, RT 4 RW 2 Krajan | Panjang jalan yang dibangun | 900.000.000 | jalan rusak |
| 12 | aspal rt 4/1 dusun krajan | kokroso, RT 4 RW 1 Krajan | Panjang jalan yang dibangun | 700.000.000 | jalan rusak |
| 13 | aspal rt 5/1 dusun krajan | kokroso, RT 5 RW 1 Krajan | Panjang jalan yang dibangun | 800.000.000 | jalan rusak |
| 14 | aspal rt 2/1 dusun bibis | gatotkoco, RT 2 RW 1 Bibis | Panjang jalan yang dibangun | 900.000.000 | jalan rusak |
| 15 | aspal rt 3/1 dusun bibis | gatotkoco, RT 3 RW 1 Bibis | Panjang jalan yang dibangun | 500.000.000 | jalan rusak |

| | | | | | |
|----|--|--------------------------------|--|--------------------------|---|
| 16 | aspal rt 1/2 dusun bibis | gatotkoco, RT 1 RW 2 Bibis | Panjang jalan yang dibangun | 1.000.000.000 | jalan rusak |
| 17 | aspal rt 2/2 dusun bibis | kokroso, RT 2 RW 2 Bibis | Panjang jalan yang dibangun | 900.000.000 | jalan rusak |
| 18 | peningkatan sarana dan prasarana museum desa | werkudoro, RT 1 RW 1 Krajan | Paket Sarana Prasarana Musium DEsa yang disediakan | 700.000.000 | prasarana belum memadai |
| 19 | talud pengaman jalan | arjuno, RT 3 RW 1 Krajan | Panjang talud Jalan yang dibangun | 500.000.000 | saluran ketika hujan air sering meluber |
| 20 | talud pengaman jalan | arjuno, RT 3 RW 2 Krajan | Panjang talud Jalan yang dibangun | 500.000.000 | saluran ketika hujan air sering meluber |
| 21 | talud pengaman jalan | arjuno, RT 4 RW 2 Krajan | Panjang talud Jalan yang dibangun | 500.000.000 | saluran ketika hujan air sering meluber |
| 22 | talud pengaman jalan | arjuno, RT 1 RW 1 Tanggungrejo | Panjang talud Jalan yang dibangun | 500.000.000 | saluran ketika hujan air sering meluber |
| 23 | talud pengaman jalan | arjuno, RT 4 RW 1 Tanggungrejo | Panjang talud Jalan yang dibangun | 500.000.000 | saluran ketika hujan air sering meluber |
| 24 | talud pengaman jalan | arjuno, RT 5 RW 1 Tanggungrejo | Panjang talud Jalan yang dibangun | 500.000.000 | saluran ketika hujan air sering meluber |
| 25 | talud pengaman jalan | arjuno, RT 2 RW 2 Tanggungrejo | Panjang talud Jalan yang dibangun | 500.000.000 | saluran ketika hujan air sering meluber |
| 26 | talud pengaman jalan | arjuno, RT 5 RW 2 Tanggungrejo | Panjang talud Jalan yang dibangun | 500.000.000 | saluran ketika hujan air sering meluber |
| 27 | talud pengaman jalan | arjuno, RT 6 RW 2 Tanggungrejo | Panjang talud Jalan yang dibangun | 500.000.000 | saluran ketika hujan air sering meluber |
| 28 | talud pengaman jalan | Ontorejo, RT 2 RW 1 Bendo | Panjang talud Jalan yang dibangun | 500.000.000 | saluran ketika hujan air sering meluber |
| 29 | talud pengaman jalan | Ontorejo, RT 3 RW 2 Bendo | Panjang talud Jalan yang dibangun | 500.000.000 | saluran ketika hujan air sering meluber |
| 30 | talud pengaman jalan | Ontorejo, RT 4 RW 2 Bendo | Panjang talud Jalan yang dibangun | 500.000.000 | saluran ketika hujan air sering meluber |
| | JUMLAH | | | 19.400.000.000,00 | |

| 6 | SUMBEREJO | | | | |
|----|---|-----------------------------|--|---------------|-------------------------------|
| 1 | pembangunan pondasi dan urug halaman balai desa | jl.merapi , RT 1 RW 2 Sabet | Paket pembangunan Pondasi yang dibangun | 200.000.000 | kondisi lapangan rendah |
| 2 | pembangunan pasar hewan dan unggas | | Paket pasar hewan yang dibangun | 2.500.000.000 | meningkatkan ekonomi masy |
| 3 | pembangunan gedung serbaguna rt.001/rw.01 dukuh sabet | jl.merapi , RT 3 RW 2 Jugo | Paket gedung yang dibangun | 800.000.000 | gedung serba guna |
| 4 | pembangunan prasarana jalan (pavingisasi) ke desa bulak rt.01/rw.02 dukuh sabet | RT 1 RW 1 Sabet | Panjang jalan yang dibangun | 250.000.000 | makadam sudah rusak |
| 5 | pembangunan talut saluran bengkok rt.001/rw.01 dkh jugo (utara lapangan) | RT 1 RW 2 Sabet | Panjang talud Jalan yang dibangun | 100.000.000 | saluran tergerus air |
| 6 | pembangunan talut saluran bengkok rt.001/rw.02 dkh jugo (barat lurung gupit) | RT 1 RW 2 Jugo | Panjang talud Jalan yang dibangun | 40.000.000 | saluran tergerus air |
| 7 | pembangunan talut pengaman tanah (tpt) rt.002/rw.01 dkh jugo | RT 1 RW 2 Jugo | Panjang talud Jalan yang dibangun | 125.000.000 | pengaman jalan |
| 8 | peningkatan jalan desa dukuh jugo (aspal jalan) rt.02/rw.01 jugo (nggading) | RT 1 RW 2 Jugo | Panjang jalan yang dibangun | 200.000.000 | kondisi aspal rusak |
| 9 | peningkatan jalan poros desa dukuh sabet rt.01/rw.02 (mayong) | RT 1 RW 2 Jugo | Panjang jalan yang dibangun | 200.000.000 | kondisi aspal rusak |
| 10 | peningkatan jalan poros desa (talut) dukuh sabet rt.01/rw.02 (mayong) | RT 1 RW 2 Sabet | Panjang talud Jalan yang dibangun | 200.000.000 | pengaman jalan |
| 11 | pembangunan rumah tidak layak huni (rtlh) | RT 1 RW 2 Sabet | Paket Rumah tidak layak huni yang dibangun | 500.000.000 | warga miskin (gakin) |
| 12 | peningkatan jalan aspal jalan dukuh jugo rt.02/rw.02 jugo (tawang arum) | Sabet - Jugo | Panjang jalan yang dibangun | 200.000.000 | kondisi rusak |
| 13 | pembangunan/rehabilitasi/ pemeliharaan prasana kantor desa | jl.merapi , RT 1 RW 2 Jugo | Paket gedung yang dibangun/dipelihara | 350.000.000 | peningkatkan pelayanan publik |

| | | | | | |
|----------|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|
| 14 | penguatan/penyertaan modal bumdes "sumber rejeki lestari" | jl.merapi , RT 1 RW 1 Sabet | Jumlah Tambahan modal Bumdes | 500.000.000 | penguatan bumdesa |
| 15 | pembangunan pemakaman milik desa/pagar makam (mayong) rt.001/rw.02 | RT 1 RW 2 Sabet | Panjang pagar makam yang dibangun | 150.000.000 | batas desa |
| 16 | pembangunan/rehabilitasi/ pemeliharaan/prasana balai desa/balai kemasy | jl.merapi ,RT 1 RW 2 Sabet | Paket Gedung kantor yang dibangun | 400.000.000 | rehab balai desa |
| 17 | pembangunan jalan usaha tani (jalan baru) rt.001/rw.02 s/d. rt02/rw.02 dkh jugo | RT 1 RW 2 Sabet dan Rt 2 RW 2 Jugo | Panjang jalan yang dibangun | 500.000.000 | jalan usaha tani lancar |
| 18 | pembangunan talut saluran lodempo rt.002/rw.01 dukuh sabet s/d dukuh jugo | RT 2 RW 1 Sabet dan Jugo | Panjang talud Jalan yang dibangun | 600.000.000 | pengairan sawah lancar |
| 19 | pembangunan pemugaran makam petilasan milik desa (mbh nursodo) rt.001/rw.01 | RT 1 RW 1 Sabet | Paket Situs Sejarah yang dibangun | 100.000.000 | makam (situs bersejarah) |
| 20 | pembangunan sumur dangkal dukuh sabet dan jugo | RT 1 RW 2 Jugo | Paket Sumur dalam yang dibangun | 100.000.000 | meningkatkan hasil pertanian |
| | JUMLAH | | | 8.015.000.000,00 | |
| 7 | NGUMPUL | | | | |
| | | | | | |
| 1 | drainase (800 m) | RT2 RW 1, Krajan | Panjang drainasi yang dibangun | 300.000.000 | tidak ada pembuangan saluran air, mengakibatkan genangan air melimpah |
| 2 | rehab kantor desa (9 x 17 m) | RT2 RW 1, Krajan | Paket Gedung kantor yang dibangun | 500.000.000 | kondisi bangunan yang sudah tidak layak |
| 3 | paving jalan (200 m) | Jl. Panjaitan RT2 RW 2, Krajan | Panjang jalan yang dibangun | 200.000.000 | kondisi jalan banyak yang rusak |
| 4 | paving jalan (300 m) | RT1 RW 2, Sobo | Panjang jalan yang dibangun | 300.000.000 | kondisi jalan banyak yang berlubang |

| | | | | | |
|----------|--|-------------------------------------|---|-------------------------|--|
| 5 | paving jalan (350 m) | RT2 RW 1,Wotan | Panjang jalan yang dibangun | 300.000.000 | kondisi jalan masih makadam dan sulit diakses |
| 6 | talud jalan (200 m) | Jl. Sunan Kalijogo RT1 RW 1, Wotan | Panjang talud Jalan yang dibangun | 150.000.000 | kondisi jalan sering retak belum ada pengaman jalannya |
| 7 | rabat beton (300 m) | Jl. Sunan Kalijogo RT2 RW 2, Wotan | Panjang jalan yang dibangun | 200.000.000 | kondisi jalan banyak yang rusak |
| 8 | rabat beton (500 m) | RT1 RW 2, Bobrok | Panjang jalan yang dibangun | 250.000.000 | kondisi jalan yang rusak |
| 9 | talud jalan (200 m) | RT2 RW 1 Ngumpoul Lor | Panjang jalan yang dibangun | 150.000.000 | kondisi jalan ambles belum ada pengaman jalan |
| | JUMLAH | | | 2.350.000.000,00 | |
| 8 | NGRAKET | | | | |
| | | | | | |
| 1 | poktan mekar sari : irigasi air tanah dalam (iatd) | jl. plosojenar, RT 2 RW 1 Jugil | Panjang Irigasi Air Tanah Dalam yang dibangun | 150.000.000 | musim kemarau kekurangan air |
| 2 | poktan mugil lestari : cultivator | jl. dorowati, RT 1 RW 1 Krajan | Alat Pertanian yang dibeli | 25.000.000 | kekurangan alat ketika pengolahan lahan |
| 3 | poktan karya mulya irigasi air tanah dalam (iatd) | jl. plongowati, RT1 RW2 Karangkepuh | Panjang Irigasi Air Tanah Dalam yang dibangun | 150.000.000 | musim kemarau kekurangan air |
| 4 | balai desa | jl. jodipati, RT2 RW 2 Krajan | Gedung kantor yang dibangun | 250.000.000 | bangunan tua |
| 5 | kantor desa | jl. jodipati, RT2 RW 2 Krajan | Gedung kantor yang dibangun | 250.000.000 | perlu direhab |
| 6 | gapuro masuk desa | Jl. Plosojenar RT 2 RW 2 Jugil | Jumlah Gapuro masuk Desa yang dibangun | 150.000.000 | belum ada gapuro |
| 7 | rehab lapangan desa | jl. jodipati, RT2 RW 2 Krajan | Luas lahan Desa yang direhabilitasi | 300.000.000 | lapangan rusak |
| 8 | hotmix jalan jodipati | jl. jodipati, RT2 RW 1 Krajan | Panjang jalan yang dibangun | 300.000.000 | jalan kurang lebar |

| | | | | | |
|----------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 9 | pelebaran jl. jodipati | jl. jodipati, RT1 RW 2 Krajan | Panjang jalan yang dibangun | 125.000.000 | jalan sempit |
| 10 | rabat jalan rt.01 rw.01 jugil | Jl. Plosojenar RT 1 RW 1 Jugil | Panjang jalan yang dibangun | 100.000.000 | jalan sempit |
| 11 | pengaspalan jalan jl. jangkar bumi | jl. jangkar bumi RT 2 RW 2 Jugil | Panjang jalan yang dibangun | 125.000.000 | jalan rusak |
| 12 | rabat/paving jalan | jl. plosso jenar, RT 1 RW 1 Jugil | Panjang jalan yang dibangun | 85.000.000 | jalan rusak |
| 13 | rabat/paving jalan | jl. dorowati RT 1 RW 1 Krajan | Panjang jalan yang dibangun | 250.000.000 | jalan ambles |
| 14 | rabat/paving jalan | jl. parang garudo RT2 RW 1 Krajan | Panjang jalan yang dibangun | 100.000.000 | jalan ambles |
| 15 | sumur dangkal | jl. karang kedempel, RT2 RW 2 Krajan | Jumlah sumur dangkal yang dibangun | 100.000.000 | musim kemarau kekurangan air |
| 16 | rabat jalan lesanpuro 1/2 krajan | jl. lesanpuro, RT1 RW 2 Krajan | Panjang jalan yang dibangun | 175.000.000 | jalan sempit |
| 17 | pengaspalan jalan plosso jenar | jl. plosso jenar, RT 1 RW 1 Jugil | Panjang jalan yang dibangun | 125.000.000 | jalan rusak |
| | JUMLAH | | | 2.760.000.000,00 | |
| 9 | DADAPAN | | | | |
| 1 | buras aspal | jalan bendungan | Panjang jalan yang dibangun | 800.000.000 | sudah tidak layak |
| 2 | drainase | RT 1-4 RW 1 | Panjang drainasi yang dibangun | 275.000.000 | sudah tidak layak |
| 3 | paving halaman balai desa | jalan bendungan | Luas halaman yang dipaving | 150.000.000 | belum mempunyai |
| 4 | rehab balai desa | jalan bendungan | Jumlah Gedung kantor yang dibangun | 500.000.000 | sudah tidak layak |
| 5 | pelebaran jalan bendungan | jalan bendungan | Panjang jalan yang dibangun | 750.000.000 | sudah tidak layak |
| 6 | rabat jalan usaha tani | Karesan - Krajan | Panjang jalan yang dibangun | 500.000.000 | belum mempunyai |

| | | | | | |
|-----------|------------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------|-------------------|
| 7 | drainase | RT 2 RW 1 Karesan | Panjang drainasi yang dibangun | 200.000.000 | sudah tidak layak |
| 8 | drainase | RT 1-4 RW 1 Krajan | Panjang drainasi yang dibangun | 275.000.000 | sudah tidak layak |
| 9 | sumur | Sempol | Jumlah sumur dangkal yang dibangun | 200.000.000 | belum mempunyai |
| 10 | hand tractor | | Jumlah alat pertanian yang dibeli | 25.000.000 | belum mempunyai |
| 11 | motor roda 3 (viar) | | Jumlah Kendaraan yang dibeli | 35.000.000 | belum mempunyai |
| 12 | pembangunan jalan tembus dan talud | RT 1 Karesan | Panjang jalan yang dibangun | 750.000.000 | belum mempunyai |
| 13 | gapura jalan masuk lingkungan | | Jumlah Gapuro jalan masuk Desa yang dibangun | 700.000.000 | belum mempunyai |
| 14 | taman jalan masuk desa | RT 4 RW 1 Sempol | Jumlah Paket Taman yang dibangun | 200.000.000 | belum mempunyai |
| 15 | jembatan jl. dadapan - gombang | RT 1 RW 1 Krajan | Panjang jembatan yang dibangun | 550.000.000 | belum mempunyai |
| 16 | drainase | RT 1 RW 1 Karesan | Panjang drainasi yang dibangun | 175.000.000 | sudah tidak layak |
| 17 | jembatan | RT 1 RW 1 Karesan | Panjang jembatan yang dibangun | 550.000.000 | sudah tidak layak |
| 18 | taman jembatan trunoredjo | RT 2 RW 1 Karesan | Jumlah Paket Taman yang dibangun | 200.000.000 | belum mempunyai |
| | JUMLAH | | | 6.835.000.000,00 | |
| 10 | SINGKIL | | | | |
| 1 | rehab kantor desa | jl. brawijaya, RT 1 RW 1 Krajan | Paket gedung yang dibangun/dipelihara | 200.000.000 | rusak ringan |
| 2 | gedung paud | jl. brawijaya, RT 1 RW 1 Krajan | Paket gedung yang dibangun | 200.000.000 | belum ada |

| | | | | | |
|-----------|--|--|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 3 | jembatan lapangan | jl. raya pacitan, RT 1 RW 1 Krajan | paket jembatan yang dibangun | 600.000.000 | belum ada |
| 4 | hotmix jalan poros desa singkil | jl. setono /banyuurip, RT 1 RW 1 Nglongop | Panjang jalan yang dibangun | 500.000.000 | jalan berlubang |
| 5 | talud jalan usaha tani | jl. sawah, RT 1 RW 1 Krajan | Panjang talud Jalan yang dibangun | 400.000.000 | belum ada |
| 6 | pengerasan jalan usaha tani | jl. sawah, RT 1 RW 1 Krajan | Panjang jalan yang dibangun | 200.000.000 | jalan tanah dan becek |
| 7 | sumur dalam | sawah bengkok, RT 1 RW 1 Krajan | Paket Sumur dalam yang dibangun | 300.000.000 | kurang memadai |
| 8 | saluran irigasi (hippa) | jl. jajar ii/walikukun, RT 1 RW 1 Sekedung | Panjang saluran Irigasi yang dibangun | 200.000.000 | belum ada |
| 9 | pembangunan wisata air | jl. brawijaya, RT 1 RW 1 Krajan | Paket Tempat wisata air yang dibangun | 500.000.000 | penyempurnaan |
| 10 | rehab kantor lembaga desa | jl. brawijaya, RT 1 RW 1 Krajan | Jumlah Gedung kantor yang dibangun | 500.000.000 | rusak ringan |
| | JUMLAH | | | 3.600.000.000,00 | |
| 11 | KARANGAN | | | | |
| 1 | pengaspalan hotmix jl.kemajuan desa karangan | jl.kemajuan, RT2 RW 2 Glagah | Panjang jalan yang dibangun | 800.000.000 | meningkatkan perekonomian |
| 2 | peninggian talud dan penahan tanah jl.kemajuan desa karangan | jl.kemajuan, RT2 RW 2 Glagah | Panjang talud Jalan yang dibangun | 500.000.000 | tanah gerak |
| 3 | pengaspalan hotmix jl.kamukten desa karangan | jl.kamukten, RT2 RW 2 Karangan | Panjang jalan yang dibangun | 500.000.000 | meningkatkan perekonomian |
| 4 | saluran jl.kamukten desa karangan | jl.kamukten, RT3 RW 1 Karangan | Panjang saluran Irigasi yang dibangun | 300.000.000 | air menggenang |
| 5 | gapura pintu masuk jl.kemajuan dusun glagah | jl.kemajuan, RT2 RW 2 Glagah | Panjang saluran Irigasi yang dibangun | 150.000.000 | mudah diingat |
| 6 | pengerasan jalan usaha tani dukuh bangil | jl.selatan lapangan, RT1 RW 2 Bangil | Panjang jalan yang dibangun | 200.000.000 | jalan baru masih tanah |
| 7 | talud jl.kasembadan dusun bangil | jl.kasembadan, RT1 RW 2 Bangil | Panjang talud Jalan yang dibangun | 350.000.000 | jalan baru masih tanah |

| | | | | | |
|----|--|--|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 8 | drainase pemukiman rt 03/01 dusun karangan | jl kautaman, RT3 RW 1 Karangan | Panjang drainasi yang dibangun | 200.000.000 | air menggenang |
| 9 | pelebaran dan pengaspalan jl.kautaman dusun glagah | jl.kautaman, RT2 RW 1 Glagah | Panjang jalan yang dibangun | 450.000.000 | jl rusak |
| 10 | rehab balai desa | jl.kasatriyan, RT3 RW 2 Karangan | Paket Gedung kantor yang dibangun | 400.000.000 | lantai rusak |
| 11 | pagar lingkungan kantor desa | jl.kasatriyan, RT3 RW 2 Karangan | Panjang pagar yang dibangun | 350.000.000 | rusa berat |
| 12 | talud pengaman jalan usaha tani | dukuh bulak, RT2 RW 2 Bulak | Panjang talud Jalan yang dibangun | 150.000.000 | jalan baru masih tanah |
| 13 | ruang perpustakaan dan taman bacaan | dusun karangan, RT3 RW 2 Karangan | Paket gedung yang dibangun | 150,000,000 | meningkatkan minat membaca |
| 14 | gapura pintu masuk | jl kawitan, RT1 RW 2 Bulak | Paket Gapuro yang dibangun | 100,000,000 | mudah diingat |
| 15 | gapura pintu masuk | jl karahayon, RT 2 RW 1 Bangil | Paket Gapuro yang dibangun | 100,000,000 | mudah diingat |
| 16 | gapura pintu masuk | jl kaluhuran, RT 2 RW 1, Karangan | Paket Gapuro yang dibangun | 100,000,000 | mudah diingat |
| 17 | penerangan jalan poros no 1556 | jl.kemajuan, RT2 RW 2 Karangan | Paket Penerangan jalan yang dibangun | 30,000,000 | gelap akses antar desa |
| 18 | pengaspalan hotmix | jl kasatriyan, RT 2 RW 1 Glagah / Karangan | Panjang jalan yang dibangun | 300,000,000 | rusak |
| 19 | gapura pintu masuk balai desa karangan | jl kasatriyan, RT3 RW 2 Karangan | Paket Gapuro yang dibangun | 350,000,000 | mudah diingat |
| 20 | drainase plat jembatan | jl kamukten, RT1 RW 2 Karangan | Panjang drainasi yang dibangun | 150,000,000 | air meluap |
| 21 | gapura pintu masuk | jl kemuning, RT3 RW 1 Glagah | Paket Gapuro yang dibangun | 150,000,000 | mudah diingat |
| 22 | plengsengan sungai depan smpn 1 balong | jl.diponegoro, RT3 RW 2 Glagah | Panjang plengsengan yang dibangun | 250.000.000 | memperlancar aliran air |
| 23 | normalisasi sungai | jl.diponegoro, RT2 RW 2 Glagah | Panjang sungai yang dinormalisasi | 250,000,000 | sungai sudah dangkal |
| | JUMLAH | | | 4.600.000.000,00 | |

| 12 | BAJANG | | | | |
|----|------------------------------|---|--|-------------|---|
| 1 | gedung polindes+ gedung paud | jalan raya bajang - ngasinan RT 3 Rw 1 Mantren | Paket gedung yang dibangun | 350.000.000 | kekurangan taman baca |
| 2 | gedung perpustakaan | jalan raya bajang - ngasinan, RT 3 Rw 1 Mantren | Paket gedung yang dibangun | 350.000.000 | perlu adanya tanda batas /masuk desa |
| 3 | gapuro | jalan raya balong - ngasinan, RT 1 Rw 2 Mantren | Paket Gapuro yang dibangun | 250.000.000 | jalan sering becek |
| 4 | makadam jalan | jalan sri rejeki, RT 1 RW 2 Taro | Panjang jalan yang dibangun | 200.000.000 | sarana olah raga kurang layak |
| 5 | urugan lapangan | jalan assa'adah, RT 1 RW 2 Taro | Paket Urug Lapangan yang disediakan | 350.000.000 | jalan sempit |
| 6 | rabat jalan | jalan kenongo, Mantren Butung | Panjang jalan yang dibangun | 150.000.000 | kelancaran pembuangan air sawah |
| 7 | drainase u | jalan sri rejeki, Taro | Panjang drainasi yang dibangun | 200.000.000 | mengatur keluar masuk debit air |
| 8 | angkup saluran + plensengan | persil blok 5 , Taro | Panjang plensengan yang dinagun | 150.000.000 | sebagai penahan tanah jalan |
| 9 | talud | jalan baru, RT 1 RW 1 Doplang | Panjang talud yang dibangun | 100.000.000 | kelancaran pembuangan air sawah |
| 10 | saluran irigasi | persil blok 12 / 13, RT 3 RW 2 Butung | Panjang Irigasi yang dibangun | 150.000.000 | kurang layak |
| 11 | jembatan | jalan mayang , RT 3 RW 1 Taro | Panjang jembatan yang dibangun | 400.000.000 | kelancaran pembuangan air sawah |
| 12 | saluran irigasi | persil blok 4, RT 1 RW 2 Taro | Panjang saluran Irigasi yang dibangun | 150.000.000 | peningkatan produktifitas pertanian |
| 13 | sumur dalam | persil blok 15, RT 3 RW 1 Mantren | Paket Sumur dalam yang dibangun | 150.000.000 | kelancaran pembuangan air sawah |

| | | | | | |
|-----------|--------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------|---|
| 14 | saluran irigasi | persil blok 16, RT 2 RW 2 Butung | Panjang saluran irigasi yang dibangun | 150.000.000 | sebagai wawasan dan pengetahuan sekaligus sebagai wahana pendidikan |
| 15 | gedung museum tani | jalan raya bajang - ngasinan, RT 3 RW 1 Mantren | Paket gedung yang dibangun | 350.000.000 | PU |
| | JUMLAH | | | 3.450.000.000,00 | |
| 13 | BALONG | | | | |
| 1 | infrastruktur jalan poros desa | jl. widodo | Panjang jalan yang dibangun | 500.000.000 | jalan rusak no. ruas 1238 |
| 2 | infrastruktur jalan poros desa | jl. raharjo | Panjang jalan yang dibangun | 500.000.000 | jalan rusak no. ruas 1237 |
| 3 | pembangunan jembatan | jl. pemuda | paket jembatan yang dibangun | 300.000.000 | jembatan sempit |
| 4 | pembangunan jembatan | jl. widodo | paket jembatan yang dibangun | 900.000.000 | jembatan tidak bisa dilewati roda 4 |
| 5 | rehab balai/kantor desa | jl. pemuda | Paket Gedung kantor yang dibangun | 400.000.000 | tidak memadahi untuk pelayanan publik |
| 6 | pembangunan tk/madin | komplek lap. jepun | Paket gedung yang dibangun | 200.000.000 | tidak layak pakai bangunan lama |
| 7 | pembangunan tk/madin | jl. yuwono dkh. sidomulyo | Paket gedung yang dibangun | 250.000.000 | tidak layak pakai bangunan lama |
| 8 | pengembangan desa wisata | kompleks lap. jepun | Paket Taman Desa yang dibangun | 800.000.000 | taman desa belum ada |
| 9 | pembangunan gapura | lapangan jepun | Paket Gapuro yang dibangun | 500.000.000 | belum ada gapura di lapangan jepun |
| 10 | pengembangan desa wisata | area taman desa | Jumlah Paket wisata yang dibangun | 700.000.000 | belum ada wisata sentra pertanian terpadu |
| 11 | pembangunan tpst3r | tanah kas desa | Alat pengolahan sampah yang dibeli | 650.000.000 | belum pengelolaan sampah |

| | | | | | |
|----|----------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------|---|
| 12 | pembukaan jalan baru | jl. baru pasar balong | Panjang jalan yang dibangun | 400.000.000 | pembukaan akses jalan baru |
| 13 | pembangunan talud | jl. yuwono dkh. sukumulyo | Panjang talud jalan yang dibangun | 300.000.000 | talud jl. yuwono rusak |
| 14 | pembangunan talud | jl. yuwono gg.1 | Panjang talud jalan yang dibangun | 300.000.000 | belum ada talud di jl. tembus yuwono i |
| 15 | pembangunan talud | jl. rahayu | Panjang talud jalan yang dibangun | 300.000.000 | talud jl. rahayu rusak karena banjir |
| 16 | peningkatan jalan | jl. sri rejeki | Panjang jalan yang dibangun | 300.000.000 | jalan sri rejeki rusak - perlu pavingisasi |
| 17 | peningkatan jalan | jl. sidodadi | Panjang jalan yang dibangun | 300.000.000 | jl. sidodadi rusak - perlu pavingisasi |
| 18 | peningkatan jalan | jl. yuwono gg.1 | Panjang jalan yang dibangun | 300.000.000 | jl. yuwono g.1 rusak - perlu pavingisasi |
| 19 | peningkatan jalan | jl slamet | Panjang jalan yang dibangun | 300.000.000 | jl. slamet rusak - perlu pavingisasi |
| 20 | peningkatan jalan | jl. masaran kidul | Panjang jalan yang dibangun | 300.000.000 | jl. masaran kidul rusak - perlu pavingisasi |
| 21 | peningkatan jalan | jl. masaran tengah | Panjang jalan yang dibangun | 300.000.000 | jl. masaran tengah belum di paving hingga tembus jl. sidodadi |
| 22 | peningkatan jalan | jl. rahayu | Panjang jalan yang dibangun | 300.000.000 | jalan rusak - perlu hot mix jl. rahayu |
| 23 | peningkatan jalan | jl. yuwono | Panjang jalan yang dibangun | 300.000.000 | jalan rusak - perlu hotmix jl. yuwono |
| 24 | peningkatan jalan | jl. santoso | Panjang jalan yang dibangun | 300.000.000 | jalan rusak - perlu hotmix jl. santoso |
| 25 | peningkatan jalan | jl. santoso | Panjang jalan yang dibangun | 300.000.000 | jl. santoso kurang lebar - perlu pelebaran jl. santoso |
| 26 | peningkatan jalan | jl. nugroho | Panjang jalan yang dibangun | 300.000.000 | drainase jl. nugroho belum tembus ke jl. santoso |
| 27 | peningkatan jalan | jl. mukti | Panjang jalan yang dibangun | 350.000.000 | jl. mukti rusak - perlu pavingisasi |

| | | | | | |
|----|---------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------|---|
| 28 | bantuan handtraktor | dkh sumber agung | Paket alat Pertanian yang dibeli | 300.000.000 | poktan sumber rejeki belum memiliki hand traktor |
| 29 | pemb. iatd -(sumur dalam) | dkh sumber agung | Paket Sumur dalam yang dibangun | 250.000.000 | poktan sumber rejeki belum memiliki sumur dalam |
| 30 | penanganan persampahan | dkh sumber agung | Alat pengolahan sampah yang dibeli | 300.000.000 | penumpukan sampah pasar balong dan sampah rumah tangga di desa balong yang tidak terkendali - perlu kendaraan angkut untuk di bawa ke tps-3 |
| 31 | pembangunan gapura | jl. waluyo | Paket Gapuro yang dibangun | 200.000.000 | jl. waluyo belum ada gapura |
| 32 | pembangunan gapura | jl. raharjo | Paket Gapuro yang dibangun | 200.000.000 | jl. raharjo belum ada gapura |
| 33 | pembangunan gapura | jl. yuwono | Paket Gapuro yang dibangun | 200.000.000 | jl. yuwono gapura rusak (robok) |
| 34 | pembangunan gapura | jl. nugroho | Paket Gapuro yang dibangun | 200.000.000 | jl. nugroho belum ada gapura |
| 35 | pembangunan gapura | jl. santoso | Paket Gapuro yang dibangun | 200.000.000 | jl. santoso - gapurnya kurang tinggi |
| 36 | pembangunan gapura | jl. rahayu timur | Paket Gapuro yang dibangun | 300.000.000 | jl. rahayu belum ada gapura |
| 37 | sarana desa wisata | dkh sumber agung | Panjang Jogging track yang dibangun | 300.000.000 | belum ada jogging track - volume (p= 330 m , l=2 m), anggaran = rp. 160.000.000,- |
| 38 | desa berdaya | rt. 02 rw. 01 | Paket Ikon Pariwisata Desa | 300.000.000 | belum adanya ikon pariwisata desa |
| 39 | jatim puspa, desa berdaya | rt. 02 rw. 01 | Pembangunan Pusat pujasera | 300.000.000 | bumdesa belum ada pusat pujasera |
| 40 | gedung serbaguna | taman desa | Paket Gedung kantor yang dibangun | 600.000.000 | belum ada gedung serba guna |

| | | | | | |
|----|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 41 | kios terpadu taman desa | taman desa | Paket Kios taman desa yang dibeli | 700.000.000 | belum ada kios terpadu |
| 42 | peningkatan jalan | hotmix jl. rahayu | Panjang jalan yang dibangun | 500.000.000 | jalan rusak dan kurang layak |
| 43 | peningkatan jalan | hotmix jl. widodo | Panjang jalan yang dibangun | 500.000.000 | jalan rusak dan kurang layak |
| 44 | peningkatan jalan | hotmix jl. raharjo | Panjang jalan yang dibangun | 500.000.000 | jalan rusak dan kurang layak |
| 45 | peningkatan jalan | hotmix jl. yuwono | Panjang jalan yang dibangun | 500.000.000 | jalan rusak dan kurang layak |
| 46 | peningkatan jalan | hotmix jl. santoso | Panjang jalan yang dibangun | 500.000.000 | jalan rusak dan kurang layak |
| 47 | peningkatan jalan | hotmix jl. nugroho | Panjang jalan yang dibangun | 500.000.000 | jalan rusak dan kurang layak |
| 48 | peningkatan jalan | hotmix jl. sidodadi | Panjang jalan yang dibangun | 500.000.000 | jalan rusak dan kurang layak |
| 49 | peningkatan jalan | hotmix jl. sri rejeki | Panjang jalan yang dibangun | 500.000.000 | jalan rusak dan kurang layak |
| 50 | peningkatan jalan | hotmix jl. handayani | Panjang jalan yang dibangun | 500.000.000 | jalan rusak dan kurang layak |
| 51 | peningkatan jalan | hotmix gg.langgeng | Panjang jalan yang dibangun | 500.000.000 | jalan rusak dan kurang layak |
| 52 | peningkatan jalan | hotmix jl. tentrem | Panjang jalan yang dibangun | 500.000.000 | jalan rusak dan kurang layak |
| 53 | peningkatan jalan | hotmix jl. basuki | Panjang jalan yang dibangun | 500.000.000 | jalan rusak dan kurang layak |
| 54 | gapura jl. basuki | gapura jl. basuki | Paket Gapuro yang dibangun | 100.000.000 | gapura rusak |
| 55 | peningkatan jalan | jl. gori | Panjang jalan yang dibangun | 50.000.000 | jalan rusak dan kurang layak |
| | JUMLAH | | | 21.150.000.000,00 | |
| 14 | JALEN | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|----|----------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------|---|
| 1 | peningkatan jalan | jl. jend. sudirman, RT 1 RW 1 Jalen | Panjang jalan yang dibangun | 200.000.000 | jalan rusak |
| 2 | peningkatan jalan | jl. gajah mada, RT 4 RW 2 Jalen | Panjang jalan yang dibangun | 200.000.000 | jalan rusak |
| 3 | peningkatan jalan | lingkungan sobo, RT 5 RW 3 Medelan | Panjang jalan yang dibangun | 400.000.000 | jalan rusak |
| 4 | pembangunan jembatan gantung | jl. dr sutomo, RT 2 RW 1 Jalen | Paket Jembatan Gantung yang dibangun | 200.000.000 | daerah terisolir |
| 5 | pembangunan talud | jl. patimura, RT 3 RW 2 Jalen | Panjang talud yang dibangun | 150.000.000 | talud rusak |
| 6 | pembangunan talud | jl. teuku umar, RT 3 RW 2 Medelan | Panjang talud yang dibangun | 150.000.000 | talud rusak |
| 7 | pembangunan talud | jl. gajah mada, RT 5 RW 3 Medelan | Panjang talud yang dibangun | 200.000.000 | talud rusak |
| 8 | pembangunan jembatan | jl. gajah mada, RT 5 RW 3 Medelan | Panjang jembatan yang dibangun | 150.000.000 | jembatan kurang lebar |
| 9 | pembangunan kantor desa lanjutan | jl. gajah mada, RT 2 RW 1 Medelan | Paket Gedung kantor yang dibangun | 300.000.000 | pembangunan lanjutan |
| 10 | pembangunan gudang bumdesa | jl. bhayangkara, RT 1 RW 1 Medelan Medelan | Paket Gedung kantor yang dibangun | 250.000.000 | memajukan usaha bumdesa |
| | JUMLAH | | | 2.200.000.000,00 | |
| 15 | KARANGMOJO | | | | |
| 1 | pembangunan kantor desa | jalan agung, RT 1 RW 1 Gajah Biru | Paket Gedung kantor yang dibangun | 200.000.000 | kurang maksimalnya dalam pelayanan masyarakat |
| 2 | rabat beton jalan | jalan agung, RT 1 RW 2 Blender | Panjang jalan yang dibangun | 450.000.000 | jalan yang rusak parah mengakibatkan terjadinya kecelakaan untuk pengguna jalan |
| 3 | pembangunan sumur dalam | jalan gejeran, RT 2 RW 2 Gajah Biru | Paket Sumur dalam yang dibangun | 100.000.000 | kurang tercukupi air untuk irigasi pertanian |
| | JUMLAH | | | 750.000.000,00 | |
| 16 | SEDARAT | | | | |

| | | | | | |
|---------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | jalan rusak | jl. mangun diharjo, RT 2 RW 1 Krajan | Panjang jalan yang dibangun | 600.000.000 | jalan rusak |
| JUMLAH | | | | 600.000.000,00 | |
| 17 | PURWOREJO | | | | |
| 1 | balai desa | jl. parikesit, RT2 RW 1 Bangunasri | Paket Gedung kantor yang dibangun | 800.000.000 | sudah tidak layak |
| 2 | kantor desa | jl. parikesit, RT2 RW 1 Bangunasri | Paket Gedung kantor yang dibangun | 500.000.000 | sudah tidak layak |
| 3 | cor rigid jalan parikesit desa purworejo | jl. parikesit, RT2 RW 1 Bangunasri | Panjang jalan yang dibangun | 800.000.000 | sudah tidak layak |
| 4 | drainase jalan parikesit desa purworejo | jl. parikesit, RT2 RW 1 Bangunasri | Panjang drainasi yang dibangun | 100.000.000 | sudah tidak layak |
| 5 | talud jalan parikesit | jl. parikesit, RT 1 RW 1 Sedarat Lor | Panjang talud jalan yang dibangun | 117.907.800 | sudah tidak layak |
| 6 | talud jalan muneng-ngampel | jl. parikesit, RT2 RW 1 Bangunasri | Panjang talud jalan yang dibangun | 117.907.800 | sudah tidak layak |
| 7 | talud jalan baru klepu | jl. baru dukuh klepu, RT 1 RW 1 Klepu | Panjang talud jalan yang dibangun | 117.907.800 | belum mempunyai |
| 8 | sumur dangkal | jl. parikesit, RT2 RW 1 Bangunasri | Paket sumur dangkal yang dibangun | 20.000.000 | belum mempunyai |
| 9 | paving jalan srirejeki | jl. srirejeki, RT1 RW 1 Patihan | Panjang jalan yang dibangun | 122.739.000 | belum mempunyai |
| 10 | paving jalan muktiaji | jl. muktiaji, RT1 RW 1 Klepu | Panjang jalan yang dibangun | 122.739.000 | belum mempunyai |
| 11 | paving jalan budiman | jl. budiman, RT1 RW 1 SEdarat Lor | Panjang jalan yang dibangun | 122.739.000 | belum mempunyai |
| 12 | paving jalan turiloyo | jl. turiloyo, RT3 RW 1 Sedarat Lor | Panjang jalan yang dibangun | 122.739.000 | belum mempunyai |
| 13 | paving jalan srigati | jl. srigati, RT 1 RW 1 Bangunasri | Panjang jalan yang dibangun | 122.739.000 | belum mempunyai |

| | | | | | |
|-----------|----------------------------------|--|---|-------------------------|--------------------------------------|
| 14 | paving jalan mayangkoro | jl. mayangkoro, RT3 RW 1 Bangunasri | Panjang jalan yang dibangun | 122.739.000 | belum mempunyai |
| 15 | talud jalan tirtosari | jl. tirtosari, RT2 RW 2 Klepu | Panjang talud Jalan yang dibangun | 117.907.800 | belum mempunyai |
| 16 | pengurukan jalan baru klepu | jl. baru klepu, RT1 RW 1 Klepu | Panjang jalan yang dibangun/diurug | 100.000.000 | belum memadai |
| 17 | pengurukan jalan baru selajur | jl. baru selajur, RT1 RW 1 Klepu | Panjang jalan yang dibangun/diurug | 100.000.000 | belum memadai |
| 18 | talud sawah patihan | jl. utari, RT1 RW 1 Patihan | Panjang talud jalan sawah yang dibangun | 117.907.800 | belum memadai |
| 19 | talud sawah klepu | jl. muktiaji, RT1 RW 1 Klepu | Panjang talud jalan sawah yang dibangun | 117.907.800 | belum memadai |
| 20 | talud sawah sedarat lor | jl. budiman, RT1 RW 1 Sedarat Lor | Panjang talud jalan sawah yang dibangun | 117.907.800 | belum memadai |
| 21 | talud jalan srigati | jl. srigati, RT1 RW 1 Bangunasri | Panjang talud jalan yang dibangun | 117.907.800 | belum memadai |
| 22 | paving jalan baru dukuh klepu | jl. baru dukuh klepu, RT 1 RW 1 Klepu | Panjang jalan yang dibangun | 122.739.000 | belum memadai |
| 23 | paving jalan baru selajur | jl. baru selajur, RT 2 RW 1 Klepu | Panjang jalan yang dibangun | 122.739.000 | belum memadai |
| 24 | normalisasi sungai sawah ngampel | jl. muneng ngampel, RT 1 RW 1 Bangunasri | Panjang sungai yang dinormalisasi | 100.000.000 | sudah tidak layak |
| | JUMLAH | | | 4.445.174.400,00 | |
| 18 | TATUNG | | | | |
| | | | | | |
| 1 | balai desa | jl. raya, RT 2 RW 1 Tatung Kidul | Paket gedung yang dibangun | 800.000.000 | kurangnya ruang pelayanan bagi warga |
| 2 | aspal jalan arjuna | jl. arjuna, RT 1 RW 2 Tatung Tengah | Panjang jalan yang dibangun | 500.000.000 | jalan menuju pertanian rusak berat |
| 3 | pelebaran jalan kresna | jl. kresna, RT 2 RW 2 Tatung Tengah | Panjang jalan yang dibangun | 200.000.000 | badan jalan sempit |
| 4 | peninggian talud jl raya tatung | jl. raya, RT 2 RW 2 Tatung | Panjang talud Jalan yang dibangun | 200.000.000 | talud jalan rusak berat |

| | | | | | |
|-----------|--|--|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| 5 | infrastruktur jalan poros desa | jl. arjuna, RT 1 RW 2 Tatung Tengah | Panjang jalan yang dibangun | 500.000.000 | jalan pertanian rusak berat |
| 6 | pemb. rabat jalan usaha tani sawah kulon | jalan sawah tatung, RT 2 RW 2 Tatung Tengah/Tatung Kidul | Panjang jalan yang dibangun | 200.000.000 | jalan pertanian rusak berat |
| 7 | pembangunan rabat jalan sawah | dukuh tatung lor, RT 3 RW 2 Tatung Lor | Panjang jalan yang dibangun | 100.000.000 | kondisi jalan rusak berat |
| 8 | pembangunan talud | jalan bungur , RT 2 RW 2 Tatung Lor | Panjang talud Jalan yang dibangun | 100.000.000 | kondisi jalan rusak berat |
| 9 | pembangunan talud | jalan sawah bengkok etan , RT 2 RW 2 Tatung Lor | Panjang talud Jalan yang dibangun | 100.000.000 | kondisi jalan rusak berat |
| 10 | pembangunan rabat | jalan bungur , RT 3 RW 2 Tatung Tengah/Tatung | Panjang jalan yang dibangun | 100.000.000 | kondisi jalan rusak berat |
| 11 | penyediaan cultivator areal penanaman tembakau | desa tatung, RT 2 RW 2 Tatung Tengah/Tatung | Paket alat Pertanian yang dibeli | 50.000.000 | masih sedikit yang dimiliki petani |
| 12 | bantuan handtraktor | desa tatung, RT 2 RW 2 Tatung Tengah/Tatung | Paket alat Pertanian yang dibeli | 100.000.000 | masih sedikit yang dimiliki petani |
| 13 | penyediaan mesin perajang tembakau | desa tatung, RT 2 RW 2 Tatung Tengah/Tatung | Paket alat Pertanian yang dibeli | 50.000.000 | masih sedikit yang dimiliki petani |
| 14 | sumur dalam | desa tatung, RT 2 RW 2 Tatung Tengah/Tatung | Paket Sumur dalam yang dibangun | 150.000.000 | masih sedikit yang dimiliki petani |
| | JUMLAH | | | 3.150.000.000,00 | |
| 19 | MUNENG | | | | |
| 1 | drainase/talud | RT 2 RW 1 Krajan | Panjang talud yang dibangun | 10.000.000 | jalur air terkadang mampet |
| 2 | rabat jalan | RT 2 RW 1 Krajan | Panjang jalan yang dibangun | 56.000.000 | jalan kurang baik |
| 3 | rabat jalan penghubung antar rt | RT 2 RW 1 Krajan | Panjang jalan yang dibangun | 100.000.000 | jalan kurang baik |
| 4 | rabat jalan pertigaan jalan penghubung | RT 4 RW 2 Krajan | Panjang jalan yang dibangun | 145.000.000 | jalan kurang baik |

| | | | | | |
|----|---|------------------|--|-------------|--|
| 5 | drainase | RT 4 RW 2 Krajan | Panjang drainasi yang dibangun | 100.000.000 | saluran air kadang mampet |
| 6 | talud sungai | RT 4 RW 2 Krajan | Panjang talud yang dibangun | 115.000.000 | mengatasi tanah longsor ke sungai |
| 7 | rabat timur rumah parwoto | RT 4 RW 2 Krajan | Panjang jalan yang dibangun | 178.000.000 | jalan kurang baik |
| 8 | buras | RT 3 RW 2 Krajan | Panjang jalan yang dibangun | 167.000.000 | jalan kurang baik |
| 9 | talud depan rumah pak tukimin ke barat | RT 3 RW 2 Krajan | Panjang talud yang dibangun | 139.000.000 | mengatasi tanah longsor ke sungai |
| 10 | talud arah makam | RT 3 RW 2 Krajan | Panjang talud yang dibangun | 179.000.000 | mengatasi tanah longsor ke sungai |
| 11 | talud sungai depan rumah bu harmi ke barat | RT 3 RW 2 Krajan | Panjang talud yang dibangun | 188.000.000 | mengatasi tanah longsor ke sungai |
| 12 | jembatan dan talud depan rumahn pak slamet ke selatan | RT 3 RW 2 Krajan | Paket Jembatan dan Talud yang dibangun | 166.000.000 | jembatan rusak dan rawan untuk di liwati |
| 13 | buras depan rumah pak seno ke selatan | RT 3 RW 2 Krajan | Panjang jalan yang dibangun | 156.000.000 | jalan kurang baik |
| 14 | rabat jalan utama | RT 2 RW 2 Krajan | Panjang jalan yang dibangun | 180.000.000 | jalan kurang baik |
| 15 | talud depan mbah sarji | RT 2 RW 2 Krajan | Panjang talud yang dibangun | 176.000.000 | tanah sering amblas |
| 16 | jembatan antar desa | RT 2 RW 2 Krajan | Panjang jembatan yang dibangun | 25.000.000 | jembatan rusak dan rawan untuk di liwati |
| 17 | rabat depan mbah sarji | RT 2 RW 2 Krajan | Panjang jalan yang dibangun | 168.000.000 | jalan kurang baik |
| 18 | irigasi depan mbah sarji | RT 2 RW 2 Krajan | Panjang drainasi yang dibangun | 111.000.000 | saluran air kadang mampet |
| 19 | rabat jalan | RT 1 RW 2 Krajan | Panjang jalan yang dibangun | 147.000.000 | jalan kurang baik |
| 20 | rabat jalan pondok | RT 1 RW 2 Krajan | Panjang jalan yang dibangun | 200.000.000 | jalan kurang baik |

| | | | | | |
|-----------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------|---|
| 21 | talud jalan tembus nglarangan | RT 1 RW 2 Krajan | Panjang talud Jalan yang dibangun | 256.000.000 | jalan masih berupa tanah dan perlu penahan di sampingnya |
| 22 | boh tengah sawah 2 titik | RT 1 RW 2 Krajan | paket jembatan yang dibangun | 50.000.000 | lubang jembatan untuk lewat air terlalu kecil dan sering meluap |
| 23 | talud sawah timur pondok | RT 1 RW 2 Krajan | Panjang talud yang dibangun | 100.000.000 | tanah sering terpelosok ke sawah |
| 24 | irigasi/talud | RT 1 RW 1 Krajan | Panjang talud yang dibangun | 100.000.000 | tanah sering terpelosok dan amblas |
| 25 | pembuatan jembatan | RT 1 RW 1 Krajan | paket jembatan yang dibangun | 30.000.000 | jembatan hanya sementara dan berbahaya |
| 26 | rabat jalan | RT 4 RW 1 Krajan | Panjang jalan yang dibangun | 177.000.000 | jalan kurang baik |
| 27 | irigasi | RT 4 RW 1 Krajan | Panjang Irigasi yang dibangun | 150.000.000 | saluran air kadang mampet |
| 28 | drainase/talud | RT 3 RW 1 Krajan | Panjang drainasi yang dibangun | 100.000.000 | tanah amblas perlu penahan dan saluran air |
| 29 | rabat jalan | RT 3 RW 1 Krajan | Panjang jalan yang dibangun | 150.000.000 | jalan kurang baik |
| 30 | peningkatan jalan antar rt | RT 3 RW 1 Krajan | Panjang jalan yang dibangun | 100.000.000 | jalan kurang baik |
| 31 | pembuatan saluran air tembus rt 4 | RT 3 RW 1 Krajan | Panjang Irigasi yang dibangun | 150.000.000 | saluran air belum ada dan sering menggenang di rumah warga |
| | JUMLAH | | | 4.069.000.000 | |
| 20 | NGAMPEL | | | | |
| 1 | saluran / drainase | Jalan poros ngampel - turi jetis RT 02 RW 02 Doyong | Panjang drainasi yang dibangun | 200.000.000 | belum ada saluannya |
| 2 | balai desa | Jl.ponorogo-pacitan, RT3 RW 2 Krajan | Gedung kantor yang dibangun | 500.000.000 | rusak/tidak layak |

| | | | | | |
|-----------|--|--|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 3 | kantor desa | Jl..ponorogo-pacitan, RT4 RW 3 Krajan | Gedung kantor yang dibangun | 500.000.000 | rusak/tidak layak |
| 4 | pembangunan talud jalan | jalan ngampel - bringin sumoroto RT 2 RW 2 Grenteng | Panjang talud Jalan yang dibangun | 400.000.000 | jalan belum ada pengaman jalannya |
| 5 | rehab jembatan | Jalan poros ngampel - turi jetis, RT 3 RW 2 Krajan | Jembatan yang dibangun/direhabilitasi | 1.000.000.000.000 | jembatan model lama rawan roboh |
| 6 | rabat jalan | Jalan nakulo, RT3 RW 1 Krajan | Panjang jalan yang dibangun | 300.000.000 | jalan masih makadam |
| 7 | drainase jalan | Jl. lo doyong .Jl.mandiri dan Jln suromenggolo RT 01 dan RT 02 RW 03 Krajan | Panjang drainasi yang dibangun | 400.000.000 | drainase tidak layak |
| 8 | pelebaran jembatan perempatan ngampel | Jalan joyo menggolo, RT 3 RW 2 Krajan | Jembatan yang dibangun/direhabilitasi | 300.000.000 | jembatan kurang lebar |
| 9 | rabat jalan | jalan ngampel - bringin sumoroto, RT 1 RW 3 Grenteng | Panjang jalan yang dibangun | 400.000.000 | kondisi jalan masih tanah |
| 10 | gedung paud | jl.ponorogo-pacitan, RT 3 RW 2 Krajan | Gedung kantor yang dibangun | 300.000.000 | penunjang pendidikan |
| | JUMLAH | | | 1.003.300.000.000 | |
| 21 | KECAMATAN | | | | |
| 1 | Pengaspalan Rigid Jalan Poros Desa Tatung - Purworejo - Sedarat | Jalan Poros Desa Tatung - Purworejo - Sedarat | Panjang jalan yang dibangun | | Pengaspalan jalan |
| 2 | Jalan Poros Desa Karang Patihan - Ngendut - Pandak | Jalan Poros Desa Karang Patihan - Ngendut - Pandak | Panjang jalan yang dibangun | | Pengaspalan jalan |
| 3 | Jalan Poros desa antar kecamatan Karang Patihan Kec. Balong - Desa Jonggol Kec. Jambon | Jalan Poros desa antar kecamatan Karang Patihan Kec. Balong - Desa Jonggol Kec. Jambon | Panjang jalan yang dibangun | | Pengaspalan jalan |
| 4 | Pelebaran Jalan Kabupaten Balong - Ngumpul. | Jalan Kabupaten Balong - Ngumpul | Panjang jalan yang dibangun | | Pelebaran Jalan |

| | | | | | |
|---|---|---|--------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 5 | Papan Nama Kecamatan Balong pintu masuk kecamatan | Papan Nama Kecamatan Balong pintu masuk kecamatan | Papan nama yang dibangun | | Papan Nama Kecamatan |
| | JUMLAH | | | 1.106.369.174.400,00 | |

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Balong dalam kurun waktu sampai dengan tahun 2026 adalah sebagai berikut

1. Menjamin terwujudnya kepastian akses dan mutu pelayanan dasar masyarakat secara optimal baik pedesaan maupun perkotaan, serta menjamin kepastian penyediaan pelayanan publik dengan model pelayanan yang efektif dan efisien .
2. Memacu pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja dalam rangka pengentasan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
3. Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta profesional yang berlandaskan norma-norma dengan mengedepankan supremasi hukum
4. Meningkatkan pemberdayaan dan penguatan perempuan serta kelembagaan masyarakat melalui keterlibatan seluruh komponen dalam setiap tahapan pembangunan disegala bidang, dan
5. Membangun dan memelihara stabilitas pemerintahan, politik, ekonomi, sosial dan budaya sehingga memberikan rasa aman bagi masyarakat, dengan memjunjung tinggi budaya dan karakter masyarakat yang agamis, bermoral dan berbudi luhur.

Sebagai modal dasar bagi perwujudan Visi dan Misi Kecamatan Balong dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Ponorogo adalah letak geografis Kecamatan Balong yang berada di Wilayah Selatan menuju Kabupaten Pacitan sangat baik dari sisi Pertanian, Perekonomian dan Sosial Budaya, serta Pariwisata.

Sebagai Jalur Utama menuju Kabupaten Pacitan, maka Desa Balong membangun Rest Area di Sekitar Lapangan Jepun Desa Balong. disamping itu, Kecamatan Balong juga mempunyai Potensi Wisata yaitu Air Terjun Kedung Mimang di Dusun Tanggungrejo Desa Karangpatihan dan Situs Budaya Patirtan Ngoro Den Panji di Dusun Bendo Wilayah Desa Karangpatihan, Wisata Alam Gunung Beruk di Desa Karangpatihan, Wisata bukit Bobrok di Desa Ngumpul, wisata Air Terjum Kedung Lesung, Wisata Alam Bukit Teletabis di Desa Pandak, Wisata Paralayang di Gunung Gede Desa Tatung.

Potensi Pertanian, Perikanan, dan Peternakan berada di sebagian besar Wilayah Desa – Desa di Kecamatan Balong, Produk perkebunan Tembakau di Desa Dadapan, Sedarat, Purworejo, Tatung dan Jalen. Sedangkan untuk Budidaya Tanaman Sayur sayuran dan Toga yang paling banyak di Desa Sedarat dan Jalen disamping desa desa lainnya juga ada. Sedangkan potensi industri rumah tangga berada hampir di semua desa dengan beragam hasil industri kecil, menengah, mikro (UMKM) yang menjadi produk unggulan Kecamatan Balong serta masih banyak lagi potensi industri yang bisa menunjang perekonomian masyarakat seperti batik ciprat sebagai wujud pemberdayaan disabilitas di Desa Karangpatihan dan batik tulis di desa Singkil yang mengarah pada kemandirian masyarakat sehingga pada akhirnya menjadi faktor pendukung kebijakan Pemerintah Daerah yang mengutamakan kemampuan daerah dalam rangka mengelola potensi sumber daya alam dan buatan yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia, energi, infrastruktur dan pelayanan publik juga sesuai dengan makna visi Kabupaten Ponorogo.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isue-isue dan analisa strategic. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Balong yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Balong Tahun 2025-2029.

Dengan menitik beratkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka Kecamatan Balong mempunyai *tujuan* :

“Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang bersih dan transparan, serta Pelayanan Publik yang Unggul Berbasis Elektronik”.

dengan Indikator Tujuan

“Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah”

Adapun Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan, sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Adapun **Sasarannya** adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi ;
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan;

Untuk mencapai sasaran tersebut perlu ditentukan **Indikator** sebagai berikut:

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi ;
2. Persentase Desa Yang meningkat Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) nya

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan – kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Faktor faktor yang menjadikan pertimbangan dalam merumuskan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Balong dalam merumuskan Program, Kegiatan, dan Sub Keegiatannya untuk mendukung Visi, Misi Kepala Daerah tidak lepas dari tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs (Sustainable Development Goals) dalam mengintegrasikan tujuan-tujuan global tersebut ke dalam pembangunan wilayah kecamatan.

Sedangkan penerapannya di tingkat kecamatan atau desa (SDGs Desa) merupakan upaya untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang lebih konkret dan terfokus pada konteks lokal diantaranya adalah sebagai berikut :

- Menanggulangi kemiskinan dalam segala bentuk di wilayah kecamatan, melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi dan sosial;
- Mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi masyarakat di kecamatan, dengan fokus pada pertanian berkelanjutan dan akses pangan yang terjangkau;
- Memastikan ketersediaan layanan kesehatan yang berkualitas, serta upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit;
- Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di semua jenjang, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan tinggi di wilayah kecamatan;

- Memastikan kesetaraan hak dan kesempatan bagi perempuan dan laki-laki di semua bidang kehidupan di kecamatan;
- Menciptakan lapangan kerja yang layak dan berkelanjutan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di kecamatan;
- Membangun infrastruktur yang berkelanjutan dan mendorong inovasi di berbagai sektor, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial di kecamatan.

Di samping hal tersebut di atas, Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Balong dalam merumuskan Program, Kegiatan, dan Sub Keegiatannya untuk mendukung Visi, Misi Kepala Daerah juga berpedoman pada NSPK, atau Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria. Di tingkat Kecamatan Balong, NSPK berperan penting dalam memastikan koordinasi, ketertiban, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. Adapun NSPK di Kecamatan Balong di antaranya adalah sebagai berikut:

- **Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan:**

NSPK membantu kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mengkoordinasikan berbagai kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, memastikan keselarasan dengan kebijakan yang lebih tinggi.

- **Ketenteraman dan Ketertiban Umum:**

NSPK menjadi panduan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan, termasuk dalam penanganan masalah sosial dan keamanan.

- **Pelayanan Publik:**

NSPK memastikan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh kecamatan kepada masyarakat dilakukan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

- **Pemberdayaan Masyarakat:**

NSPK juga menjadi acuan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan, penyuluhan, dan program-program lain yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat kecamatan.

- **Manajemen ASN:**

NSPK juga mengatur standar dan prosedur dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di kecamatan, termasuk dalam hal rekrutmen, pengembangan karir, dan penilaian kinerja.

NSPK di kecamatan sangat penting karena :

- Membantu menciptakan keseragaman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di semua kecamatan, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat lebih merata dan berkualitas;
- Kinerja kecamatan dapat diukur dan dievaluasi secara lebih objektif, sehingga mendorong peningkatan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- Membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada di kecamatan, sehingga pelayanan publik dapat diberikan dengan lebih efisien;
- Mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan praktik-praktik korupsi di tingkat kecamatan.

Dengan demikian, NSPK memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa kecamatan berfungsi dengan baik dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Sejalan dengan visi, misi dan tujuan serta strategi yang ingin diwujudkan, program – program yang direncanakan Kecamatan Balong adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik ;
3. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

Berbagai kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana tersebut pada Permendagri Nomor : 90 Tahun 2019, yang dilakukan Kecamatan Balong adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :

- a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah.
 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
- c. Administrasi Umum;Perangkat Daerah
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik :

- a. .Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
 - Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta

3. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

- a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa;
 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif;
 - Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Dari Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Balong Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

- Jumlah Program ada 3 Program

- Jumlah Kegiatan ada 7 Kegiatan
- Jumlah Sub Kegiatan ada 18 Sub Kegiatan

Sedangkan dari seluruh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Balong tahun 2026 membutuhkan anggaran sebesar Rp. 2.398.947.633,- (Dua Milyard Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).

Adapun Tabel perumusan program dan kegiatan dan Sub Kegiatan tersaji dalam lampiran Format E sebagai berikut :

FORMAT E
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
dan Perkiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Ponorogo

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Balong

Lembar..... dari

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2026 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|-----------------------|---|--|--------------------|------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | KECAMATAN BALONG | | | | 2.398.947.633,00 | DAU | | | 2.372.700.400,00 |
| 7. | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | 2.398.947.633,00 | DAU | | | 2.372.700.400,00 |
| 7.01 | KECAMATAN | | | | 2.398.947.633,00 | DAU | | | 2.372.700.400,00 |
| 7.1.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase cakupan pelayanan administrasi Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian yang sesuai SOP | Kec. Balong | 100% | 2.151.621.133,00 | DAU | | 100% | 2.125.373.900,00 |
| 7.1.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu. | Kec. Balong | 100% | 2.000.000,00 | DAU | | 100% | 3.000.000,00 |
| 7.1.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kec. Balong | 8 Dokumen | 1.000.000,00 | DAU | | 8 Dokumen | 1.500.000,00 |
| 7.1.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kec. Balong | 22 Laporan | 1.000.000,00 | DAU | | 22 Laporan | 1.500.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|--------------------|-----------------|-------------------------|------------|--|-----------------|-------------------------|
| 7.1.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase pelaksanaan administrasi realisasi anggaran serta pengelolaan pencatatan aset yang akuntabel | Kec. Balong | 100% | 1.816.601.933,00 | DAU | | 100% | 1.920.820.000,00 |
| 7.1.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Kec. Balong | 18 Orang /Bulan | 1.796.281.933,00 | DAU | | 18 Orang /Bulan | 1.900.000.000,00 |
| 7.1.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kec. Balong | 12 Dokumen | 19.320.000,00 | DAU | | 12 Dokumen | 19.320.000,00 |
| 7.1.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kec. Balong | 5 Laporan | 1.000.000,00 | DAU | | 5 Laporan | 1.500.000,00 |
| 7.1.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan sarana prasarana perangkat daerah yang memadai | Kec. Balong | 100% | 99.478.200,00 | DAU | | 100% | 112.786.300,00 |
| 7.1.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Kec. Balong | 3 Paket | 29.000.000,00 | DAU | | 3 Paket | 33.000.000,00 |
| 7.1.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Kec. Balong | 4 Paket | 57.588.200,00 | DAU | | 4 Paket | 66.896.300,00 |
| 7.1.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Kec. Balong | 1 Paket | 2.970.000,00 | DAU | | 1 Paket | 2.970.000,00 |
| 7.1.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kec. Balong | 12 Laporan | 9.920.000,00 | DAU | | 12 Laporan | 9.920.000,00 |
| 7.1.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan sarana prasarana perangkat daerah yang memadai | Kec. Balong | 100% | 10.591.150,00 | DAU | | 100% | 13.440.000,00 |
| 7.1.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Kec. Balong | 12 Laporan | 10.591.150,00 | DAU | | 12 Laporan | 13.440.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---|--------------------|-------------|-----------------------|------------|--|-------------|-----------------------|
| 7.1.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan sarana prasarana perangkat daerah yang memadai | Kec. Balong | 100% | 222.949.850,00 | DAU | | 100% | 75.327.600,00 |
| 7.1.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Kec. Balong | 6 Unit | 50.832.250,00 | DAU | | 6 Unit | 55.900.000,00 |
| 7.1.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Kec. Balong | 6 Unit | 2.117.600,00 | DAU | | 6 Unit | 5.427.600,00 |
| 7.1.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Kec. Balong | 3 Unit | 170.000.000,00 | DAU | | 3 Unit | 14.000.000,00 |
| 7.1.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP | Kec. Balong | 94% | 29.948.500,00 | DAU | | 94% | 29.948.500,00 |
| 7.1.01.02. 2.03 | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Persentase koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang terpelihara | Kec. Balong | 100% | 29.948.500,00 | DAU | | 100% | 29.948.500,00 |
| 7.1.01.02. 2.03.0002 | Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta | Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta | Kec. Balong | 3 Unit | 29.948.500,00 | DAU | | 3 Unit | 29.948.500,00 |
| 7.1.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kec. Balong | 100% | 217.378.000,00 | DAU | | 100% | 217.378.000,00 |
| 7.1.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase desa yang memenuhi standar tata kelola pemerintah desa di wilayah kecamatan | Kec. Balong | 100% | 217.378.000,00 | DAU | | 100% | 217.378.000,00 |
| 7.1.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Kec. Balong | 20 Dokumen | 92.603.000,00 | DAU | | 20 Dokumen | 92.603.000,00 |
| 7.1.01.06.2.01.0004 | Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan | Kec. Balong | 12 Laporan | 8.200.000,00 | DAU | | 12 Laporan | 8.200.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---|-------------|------------|-------------------------|-----|--|------------|-------------------------|
| 7.1.01.06.2.01.0013 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Kec. Balong | 20 Dokumen | 24.000.000,00 | DAU | | 20 Dokumen | 24.000.000,00 |
| 7.1.01.06.2.01.0016 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Kec. Balong | 20 Dokumen | 92.575.000,00 | DAU | | 20 Dokumen | 92.575.000,00 |
| | JUMLAH | | | | 2.398.947.633,00 | | | | 2.372.700.400,00 |

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Balong mengacu Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan. Program-program Kecamatan Balong pada Tahun 2026, untuk mendukung Misi Kabupaten Ponorogo khususnya misi 4 yaitu : **“Transformasi Tata Kelola Untuk Mewujudkan Birokrasi yang Transparan, Akuntabel, Inklusif, Bermanfaat, serta Berdampak Secara Sosial dan Ekonomi Berbasis Revolusi Teknologi Informasi”**. sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029.

Sedangkan untuk Prioritas Pembangunan di Kecamatan mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah di Kabupaten Ponorogo sesuai (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2026 adalah **“Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik serta Peningkatan Keamanan dan Ketertiban”**, dengan tema **“Pembangunan Infrastruktur Dasar Penunjang Sarana Prasarana Perhubungan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau, Penguatan Usaha Mikro yang didukung Aparatur Profesional “**. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Balong dapat dilihat sebagaimana berikut :

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2026 | | | |
|----------------------|--|---|--------------------|------------------------|---------------------------------|--------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sum ber Dana |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | KECAMATAN BALONG | | | | 2.398.947.633,00 | DAU |
| 7. | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | 2.398.947.633,00 | DAU |
| 7.01 | KECAMATAN | | | | 2.398.947.633,00 | DAU |
| 7.1.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase cakupan pelayanan administrasi Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian yang sesuai SOP | Kec. Balong | 100% | 2.151.621.133,00 | DAU |
| 7.1.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu. | Kec. Balong | 100% | 2.000.000,00 | DAU |
| 7.1.01.01.2.01.00 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kec. Balong | 8 Dokumen | 1.000.000,00 | DAU |

| | | | | | | |
|-------------------------|---|--|--------------------|-----------------|-------------------------|------------|
| 7.1.01.01.2.01.00 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kec. Balong | 22 Laporan | 1.000.000,00 | DAU |
| 7.1.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase pelaksanaan administrasi realisasi anggaran serta pengelolaan pencatatan aset yang akuntabel | Kec. Balong | 100% | 1.816.601.933,00 | DAU |
| 7.1.01.01.2.02.00 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Kec. Balong | 18 Orang /Bulan | 1.796.281.933,00 | DAU |
| 7.1.01.01.2.02.00 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kec. Balong | 12 Dokumen | 19.320.000,00 | DAU |
| 7.1.01.01.2.02.00 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kec. Balong | 5 Laporan | 1.000.000,00 | DAU |
| 7.1.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan sarana prasarana perangkat daerah yang memadai | Kec. Balong | 100% | 99.478.200,00 | DAU |
| 7.1.01.01.2.06.00 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Kec. Balong | 3 Paket | 29.000.000,00 | DAU |
| 7.1.01.01.2.06.00 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Kec. Balong | 4 Paket | 57.588.200,00 | DAU |
| 7.1.01.01.2.06.00 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Kec. Balong | 1 Paket | 2.970.000,00 | DAU |
| 7.1.01.01.2.06.00 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kec. Balong | 12 Laporan | 9.920.000,00 | DAU |
| 7.1.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan sarana prasarana perangkat daerah yang memadai | Kec. Balong | 100% | 10.591.150,00 | DAU |
| 7.1.01.01.2.08.00 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Kec. Balong | 12 Laporan | 10.591.150,00 | DAU |
| 7.1.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan sarana prasarana perangkat daerah yang memadai | Kec. Balong | 100% | 222.949.850,00 | DAU |
| 7.1.01.01.2.09.00 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Kec. Balong | 6 Unit | 50.832.250,00 | DAU |
| 7.1.01.01.2.09.00 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Kec. Balong | 6 Unit | 2.117.600,00 | DAU |
| 7.1.01.01.2.09.00 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Kec. Balong | 3 Unit | 170.000.000,00 | DAU |
| 7.1.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP | Kec. Balong | 94% | 29.948.500,00 | DAU |

| | | | | | | |
|----------------------|--|---|--------------------|-------------|-------------------------|------------|
| 7.1.01.02. 2.03 | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Persentase koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang terpelihara | Kec. Balong | 100% | 29.948.500,00 | DAU |
| 7.1.01.02. 2.03.0002 | Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta | Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta | Kec. Balong | 3 Unit | 29.948.500,00 | DAU |
| 7.1.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kec. Balong | 100% | 217.378.000,00 | DAU |
| 7.1.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase desa yang memenuhi standar tata kelola pemerintah desa di wilayah kecamatan | Kec. Balong | 100% | 217.378.000,00 | DAU |
| 7.1.01.06.2.01.00 03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Kec. Balong | 20 Dokumen | 92.603.000,00 | DAU |
| 7.1.01.06.2.01.00 04 | Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan | Kec. Balong | 12 Laporan | 8.200.000,00 | DAU |
| 7.1.01.06.2.01.00 13 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Kec. Balong | 20 Dokumen | 24.000.000,00 | DAU |
| 7.1.01.06.2.01.00 16 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Kec. Balong | 20 Dokumen | 92.575.000,00 | DAU |
| | JUMLAH | | | | 2.398.947.633,00 | |

BAB V

P E N U T U P

Pada dasarnya seluruh program-program kerja, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Balong dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Ponorogo di Kecamatan Balong.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Balong. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Balong ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Ponorogo secara keseluruhan.

Kaidah-kaidah pelaksanaan program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Balong dan mengacu pada RKPD dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu APBD. Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kinerja (Renja) Kecamatan Balong Tahun 2026, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana kerja kesemua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana kerja yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi Renja ini dan untuk meningkatkan rasa tanggungjawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam Renja yang sudah dibuat
3. Pelaksanaan program, kegiatan Sub Kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan

- sosialisasi Rencana Kerja kesemua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan kearah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
 5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk memperlakukan terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Balong Tahun 2024 disusun, diharapkan mampu melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, walau dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sempurna dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, namun secara umum Rencana Kerja ini sudah mencakup semua program pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat. Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu :

“MEWUJUDKAN PONOROGO HEBAT (Harmonis, Elok, Bergas, Amanah Dan Ber-taqwa)” Amien

Balong, Agustus 2025

Plt. Camat Balong



Poni Khristiawan, S.STP, M.Si

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19761213 199511 1 001